

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN  
DI PROPINSI D.I. YOGYAKARTA  
PERIODE TAHUN 2008 – 2014**

Disusun dalam rangka menulis skripsi



Nama

Oleh :

: SyahidaSyita

NomorMahasiswa

: 12313058

Jurusan

: IlmuEkonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

**2017**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN  
DI PROPINSI D.I. YOGYAKARTA  
PERIODE TAHUN 2008 – 2014**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk  
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Ilmu Ekonomi  
pada Fakultas Ekonomi UII



Oleh :

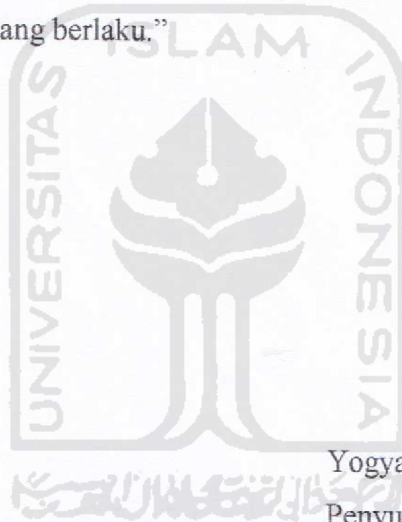
Nama : Syahida Syita  
Nomor Mahasiswa : 12313058  
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



Yogyakarta, Januari 2017

Penyusun,

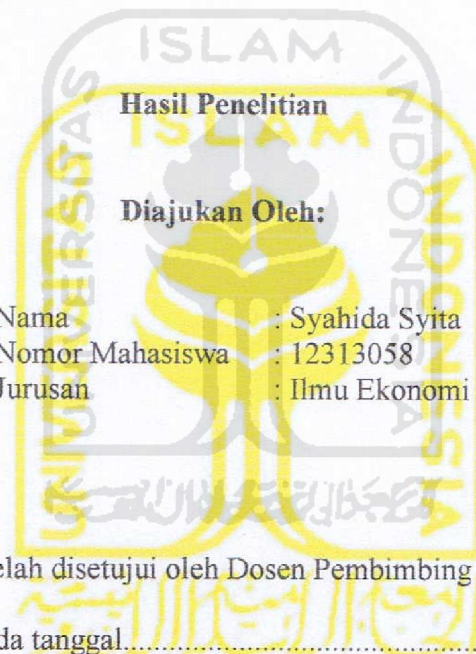


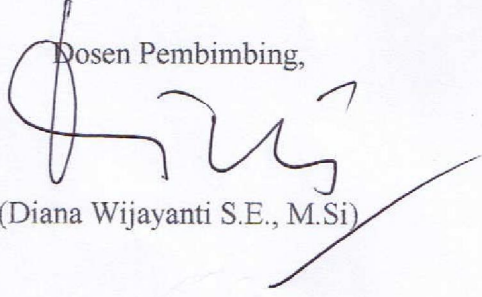
(Syahida Syita)

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini telah disahkan dan disetujui oleh dosen pembimbing skripsi  
dengan judul:

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN  
DI PROPINSI D.I. YOGYAKARTA  
PERIODE TAHUN 2008 – 2014**



Dosen Pembimbing,  
  
(Diana Wijayanti S.E., M.Si)



BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN DISTRIBUSI  
PENDAPATAN DI PROVINSI D.I YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2008-2014**

Disusun Oleh : **SYAHIDA SYITA**

Nomor Mahasiswa : **12313058**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Kamis, tanggal: 16 Februari 2017

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Diana Wijayanti, Dra., M.Si.

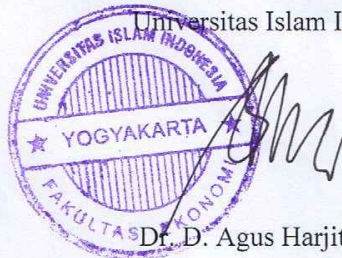
Penguji : Akhsyim Afandi, Drs., MA., Ph.D.

Awan Setya Dewanta, Drs., M.Ec.Dev.

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

## *MOTTO*

Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya itu adalah untuk  
dirinya sendiri

(QS. Al Ankabut:6)

Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara  
kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan

(QS. Al-Mujadillah:11)

Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai  
penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar

(QS. Al-Baqarah: 153)

Berakit-rakit ke hulu berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu  
bersenang-senang kemudian

(penulis)

## PERSEMBAHAN



*Alhamdulillahirobbil'allamin*

*Persembahan penulis terhadap skripsi ini:*

*Kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat, kesehatan, kemudahan serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi.*

*Kepada (Alm) Abah dan Mama ku yang tercinta yang telah memberikan dukungan berbentuk materi, moral dan semangat yang tidak ternilai didalam hidup saya.*

*Serta saya sangat berterima kasih untuk semua yang telah mendukung dan memberi semangat terutama kepada ALLAH yang selalu memberikan kemudahan, keluarga, sahabat, teman-teman, yang selalu mensupport serta memotivasi saya. Karena dukungan anda semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan hikmat dan akurat.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamuallaikum Wr. Wb*

Alhamdulillahrabbi'l'alamin dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-nya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi sampai tuntas. Shalawat beserta salam tidak lupa sekiranya selalu dipanjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan keluarga serta para sahabatnya sampai akhir zaman. Berkat beliau penuh cahaya islam dan iman hingga saat ini. Dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan orang-orang disekitar penulis. Oleh karena itu, mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kekuatan serta rahmatnya untuk menyelesaikan amanah ini.
2. Bapak Ir. Harsoyo, M.Sc, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr., Drs Dwipraptono Agus H, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. Akhsyim Afandi, MA, Ph. D. selaku kepala Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Diana Wijayanti S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu memberi kritik dan saran terbaiknya sebagai inspirasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.



6. Kepada abah saya (Alm) Hj.Achmad Baraba dan mama saya Hj.Soraya yang selalu memberikan semangat serta do'a dan nasehat-nasehat mereka semua merupakan salah satu motivasi terbaik dalam hidup saya serta selalu memberikan semangat dan kasih sayang untuk saya.
7. Kepada kakak kakaku tercinta Abdullah, Sarah Syafira, Muna yang selalu memberikan semangat kepada saya dalam mengerjakan skripsi.
8. Kepada sepupu tercinta dan teman kecilku Milla Tina dan Ines Farahdita yang selalu memberikan motivasi terbaiknya kepada saya.
9. Kepada sahabat sekaligus keluarga kedua saya selama di Jogja Reni Sutiani, Yulvica Purna Prasetya Nindyasari, Linda Faricha Rachma, Nindiani Rizky Utami, Meila Indah Evianasari, Citra Wahyu Perwitasari, Dita Ardanti, yang telah menjadi tempat berbagi suka duka selama ini serta membantu di dalam do'a maupun dukungannya sejauh ini.
10. Kepada sahabat dan keluarga KKN unit 324 Marisa Nurmasari, Lusi Wurandhini, Widya Citra Lestari, Doni Kurniawan, Muhammad Aris, Agung Prawidha, Arif yang telah memberikan dukungannya kepada saya.
11. Kepada teman seperjuangan IE 2012 yang telah memberikan dukungannya selama kuliah di UII.
12. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan serta membantu dalam penelitian maupun penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membaca tulisan ini. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan, sehingga segala kekurangan yang terdapat pada skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk penelitian dimasa yang akan datang dan menjadi sumber referensi. Dan tak lupa penulis mengharapkan saran dan kritik atas skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Mei 2016

Penulis



Syahida Syita

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3. Manfaat dan Tujuan Penelitian .....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Kajian Pustaka .....	7
2.2. Landasan Teori.....	10
2.2.1. Ketimpangan Pendapatan Nasional .....	10

2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi .....	15
2.2.3. Jumlah Penduduk yang Bekerja .....	20
2.2.4. Pengeluaran Pemerintah .....	22
2.2.5. Investasi .....	27
2.5. Hipotesis Kuznet .....	30
2.6. Kerangka Pemikiran .....	32
2.6. Hubungan Antar Variabel .....	32
2.7. Hipotesis Penelitian .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>
3.1. Ruang Lingkup Penelitian .....	38
3.2. Jenis dan Sumber Data .....	38
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.4. Definisi Operasional Variabel .....	39
3.5. Model Analisis .....	42
3.5.1. Uji MWD .....	43
3.5.2. Goodness of Fit .....	45
3.5.3. Uji Asumsi Klasik .....	47
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>51</b>
4.1 Analisis Deskriptif .....	51
4.2. Pemilihan Model Regresi .....	55
4.3. Analisis Regresi Linier Berganda .....	56
4.2.1. Uji t .....	58
4.2.2. Uji F .....	60

4.2.3. Koefisien Determinasi .....	61
4.2.4. Uji Asumsi Klasik .....	62
4.3 Pembahasan .....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	72
5.1 Kesimpulan .....	72
5.2 Saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	75
LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Keputusan Hasil Uji MWD .....	44
Tabel 4.1. Ketimpangan Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota Propinsi DIY .....	52
Tabel 4.2. Hasil Uji MWD Linier .....	55
Tabel 4.3. Hasil Uji MWD Log Linier .....	56
Tabel 4.4. Hasil Estimasi Regresi .....	57
Tabel 4.5. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	63
Tabel 4.6. Hasil Uji Autokorelasi dengan Breusch-Godfrey Serial ....	64
Tabel 4.7. Hasil Uji Multikolinieritas .....	65





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Grafik Kuznet .....	31
Grafik 2.2. Kerangka Pemikiran .....	32
Gambar 4.1. Indeks Williamson di DIY .....	52
Gambar 4.2. Hasil Uji Normalitas .....	60



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Data Penelitian
- Lampiran 2. Uji MWD
- Lampiran 3. Hasil Regresi Linier Berganda dan Uji Asumsi Klasik



## ABSTRAKSI

### ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROPINSI D.I. YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2008 – 2014

Oleh :  
Syahida Syita

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dan mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk yang bekerja, pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY periode tahun 2008 – 2014. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota se propinsi DIY. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus, sehingga seluruh kabupaten/kota yang ada di Propinsi DIY. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis statistik. Sedangkan model penelitian menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY periode tahun 2008 – 2014 termasuk dalam kriteria yang rendah, dengan rata-rata indeks williamson sebesar 0,34229, 2) pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY, 3) Jumlah penduduk yang bekerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten di Propinsi DIY, 4) Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten di Propinsi DIY dan 5) investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY.

Kata Kunci : *pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk yang bekerja, pengeluaran pemerintah, investasi, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi merupakan suatu tekad masyarakat untuk berupaya mencapai kehidupan yang lebih baik dalam peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang pokok, peningkatan standar hidup secara ekonomis dan sosial. Menurut Sukirno (2010), pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan daerah sebenarnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi yang cepat maka akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi (Lili, 2008).

Dampak dari terjadinya ketimpangan dapat berupa dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan

meningkatkan pertumbuhannya sehingga akan tercapai kesejahteraannya. Dampak negatif dari ketimpangan antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi akan sering dipandang tidak adil (Todaro, 2004). Dampak negatif ketimpangan inilah yang akan menjadi masalah pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan tersebut yaitu menggunakan rasio gini yang memiliki nilai 0 sampai dengan 1. Nilai rasio gini semakin mendekati 1 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi. Untuk melihat nilai rasio gini di Indonesia berdasarkan provinsi pada kurun waktu 2008-2013, dapat dilihat pada tabel 1.1.

Dari Tabel 1 di atas, Yogyakarta memiliki nilai rasio gini 0,43 pada tahun 2012 dan 0,439 pada tahun 2013. Dengan data tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Yogyakarta menempati urutan kedua tertinggi setelah Papua dengan rasio gini 0,44 pada tahun 2012 dan 0,442 pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa propinsi Yogyakarta memiliki ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup tinggi.

Tabel 1.1. Rasio Gini Propinsi Se Indoensia

Propinsi	Rasio Gini					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aceh	0,27	0,29	0,30	0,33	0,32	0,341
Sumatera Utara	0,31	0,32	0,35	0,35	0,33	0,354
Sumatera Barat	0,29	0,30	0,33	0,35	0,36	0,363
Riau	0,31	0,33	0,33	0,36	0,40	0,374
Jambi	0,28	0,27	0,30	0,34	0,34	0,348
Sumatera Selatan	0,30	0,31	0,34	0,34	0,40	0,383
Bengkulu	0,33	0,30	0,37	0,36	0,35	0,386
Lampung	0,35	0,35	0,36	0,37	0,36	0,356
Kepulauan Bangka Belitung	0,26	0,29	0,30	0,30	0,29	0,313
Kepulauan Riau	0,30	0,29	0,29	0,32	0,35	0,362
DKI Jakarta	0,33	0,36	0,36	0,44	0,42	0,433
Jawa Barat	0,35	0,36	0,36	0,41	0,41	0,411
Jawa Tengah	0,31	0,32	0,34	0,38	0,38	0,387
DI Yogyakarta	0,36	0,38	0,41	0,40	0,43	0,439
Jawa Timur	0,33	0,33	0,34	0,37	0,36	0,364
Banten	0,34	0,37	0,42	0,40	0,39	0,399
Bali	0,30	0,31	0,37	0,41	0,43	0,403
Nusa Tenggara Barat	0,33	0,35	0,40	0,36	0,35	0,364
Nusa Tenggara Timur	0,34	0,36	0,38	0,36	0,36	0,352
Kalimantan Barat	0,31	0,32	0,37	0,40	0,38	0,396
Kalimantan Tengah	0,29	0,29	0,30	0,34	0,33	0,350
Kalimantan Selatan	0,33	0,35	0,37	0,37	0,38	0,359
Kalimantan Timur	0,34	0,38	0,37	0,38	0,36	0,371
Sulawesi Utara	0,28	0,31	0,37	0,39	0,43	0,422
Sulawesi Tengah	0,33	0,34	0,37	0,38	0,40	0,407
Sulawesi Selatan	0,36	0,39	0,40	0,41	0,41	0,429
Sulawesi Tenggara	0,33	0,36	0,42	0,41	0,40	0,426
Gorontalo	0,34	0,35	0,43	0,46	0,44	0,437
Sulawesi Barat	0,31	0,30	0,36	0,34	0,31	0,349
Maluku	0,31	0,31	0,33	0,41	0,38	0,370
Maluku Utara	0,33	0,33	0,34	0,33	0,34	0,318
Papua Barat	0,31	0,35	0,38	0,40	0,43	0,431
Papua	0,40	0,38	0,41	0,42	0,44	0,442
INDONESIA	0,35	0,37	0,38	0,41	0,41	0,413

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (2016)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan daerah. Dalam penelitian Putri dkk (2012) faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan daerah terdiri dari pertumbuhan ekonomi, produktivitas



tenaga kerja, investasi dan IPM. Dalam penelitian Dhyatmika dan Atmini (2013) faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan wilayah terdiri dari penanaman modal asing, pengeluaran pembangunan pemerintah dan tingkat pengangguran. Berbeda lagi dengan penelitian Sultan dan Sodik (2010) yang menggunakan faktor pertumbuhan penanaman modal asing, pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan PDRB untuk memprediksi ketimpangan pendapatan regional. Sementara penelitian Adipuryanti dan Sudibia (2015) menggunakan variabel jumlah penduduk yang bekerja dan investasi untuk memprediksi ketimpangan distribusi pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi.

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan maka penelitian ini menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk yang bekerja, pengeluaran pemerintah dan investasi dalam hubungannya dengan tingkat ketimpangan pendapatan di propinsi DIY. Atas dasar tersebut judul penelitian ini yaitu **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Propinsi D.I. Yogyakarta Periode Tahun 2008 – 2014**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis terlebih dahulu mengemukakan permasalahan yang menjadi objek analisis penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, Penulis mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk yang bekerja terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY periode tahun 2008 – 2014?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY periode tahun 2008 – 2014?
3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY periode tahun 2008 – 2014?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk yang bekerja, pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY periode tahun 2008 – 2014.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk dipertimbangkan dalam pengambil keputusan dan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi para pembaca yang tertarik untuk meneliti hal yang sama
3. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Kajian Pustaka

Sultan dan Sodiq (2010), dalam penelitian yang berjudul Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional Di Diy-Jawa Tengah Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Periode (2000- 2004), menganalisis ketimpangan pendapatan daerah, pertumbuhan investasi asing (FDI), pertumbuhan ekspor, pertumbuhan PDB DIY-Jawa Tengah periode 2000-2004. Data digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data pooling, yang merupakan Kombinasi dari data time series (*time series*) dan cross section terdiri dari 2 provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Alat analisis yang digunakan adalah Indeks Theil entropy dan regresi dengan metode OLS (*ordinary least squared*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan pendapatan regional di DIY dan Jawa Tengah dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. Pertumbuhan penanaman modal asing mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan regional di DIY dan Jawa Tengah tahun 2000-2004. Pertumbuhan ekspor mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan regional di DIY dan Jawa Tengah tahun 2000-2004. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan regional di DIY dan Jawa Tengah tahun 2000-2004

Putri, Amar dan Aimon (2012), dalam penelitian yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia, menganalisis dan menentukan (1) pengaruh derajat otonomi fiskal, rasio pajak dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, (2) pengaruh pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi dan indeks pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan asosiatif. Sedangkan jenis data adalah data dokumenter, data Sumber adalah panel data yang dimulai pada 2008 - 2012 di 33 provinsi di Indonesia dengan jumlah data (n) sebanyak  $6 \times 33 = 198$ . Penelitian ini menggunakan model persamaan analisis simultan dengan metode Least Squared Method (ILS). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) tingkat otonomi fiskal, rasio pajak dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. (2) Variabel pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia secara signifikan.

Dhyatmika dan Atmanti (2013), dalam penelitian yang berjudul Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran, menganalisis tentang 1) besarnya ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Banten setelah pemekaran; 2) mengklasifikasikan kabupaten / kota berdasarkan tipologi Klassen; 3) menganalisis pengaruh investasi asing langsung (FDI), pengeluaran pemerintah (GE), dan tingkat pengangguran

(UE) terhadap ketimpangan pembangunan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 1) *williamson Index*, 2) tipologi *Klassen*, dan 3) Analisis data panel dengan *fixed effect* metode model (FEM) dengan waktu penelitian 2001-2011. Itu Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan dalam pembangunan Provinsi Banten cenderung meningkat. Berdasarkan pada tipologi *Klassen*, tangerang dan kota cilegon adalah pada kelompok regional yang maju dan cepat tumbuh, Kabupaten tangerang merupakan sekelompok daerah yang berkembang dengan cepat dibandingkan daerah lainnya. Hasil Analisis data panel dengan metode FEM, langsung investasi asing (FDI) dan pengeluaran pemerintah mempengaruhi positif dan negatif terhadap ketidaksetaraan, sementara variabel tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten setelah pemekeran.

Adipuryanti dan Sudibia (2015), dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali, menganalisis pengaruh secara langsung maupun tidak langsung jumlah penduduk yang bekerja dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dari tahun 2007-2013. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi non partisipan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa jumlah



penduduk yang bekerja dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel mediasi dalam pengaruh tidak langsung jumlah penduduk yang bekerja dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Ketimpangan Pendapatan Regional**

#### **1. Definisi Ketimpangan Pendapatan Regional**

Ketimpangan pendapatan regional merupakan ketidakmerataan pendapatan yang terjadi pada masyarakat suatu wilayah dengan wilayah lain. Ketidakmerataan tersebut disebabkan adanya perbedaan faktor yang terdapat dalam wilayah tersebut. Faktor-faktor yang terkait antara lain kepemilikan sumber daya, fasilitas yang dimiliki, infrastruktur, keadaan geografis wilayah dan lain sebagainya.

Menurut Kuncoro (2004), terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis development gap antar wilayah. Indikator tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Human Development Index (HDI), konsumsi rumah tangga perkapita, kontribusi sektoral terhadap PDRB, tingkat kemiskinan dan struktur fiskal. Faktor-faktor penyebab ketimpangan ekonomi daerah adalah konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat

mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah, perbedaan sumber daya alam antar wilayah, perbedaan kondisi demograf antar wilayah dan kurang lancarnya perdagangan antar wilayah.

Adanya alokasi investasi yang tidak merata di seluruh wilayah. Karena investor lebih memilih wilayah yang memiliki fasilitas yang baik seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga sumber daya manusia. Sedangkan, daerah yang tidak memiliki fasilitas yang belum baik akan semakin tertinggal, demikian akan menghasilkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar, sehingga akan berdampak pula pada terhadap tingkat pendapatan daerah.

Menurut Arsyad (1999), terdapat beberapa penelitian mengenai masalah ketimpangan ekonomi antar wilayah sudah dilakukan. Menurut Myrdal (1957) perbedaan tingkat pembangunan antar daerah mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah. Adanya ekspansi ekonomi pada daerah kaya akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) lebih besar dari pada pengaruh yang menguntungkan (*Spread effect*), dan akan memperlambat proses pembangunan pada daerah miskin. Akibatnya akan terjadi ketidakseimbangan. Sejalan dengan Myrdal, Hirschman (1973) mengemukakan bahwa jika suatu daerah mengalami perkembangan, maka perkembangan itu akan membawa pengaruh atau imbas ke daerah lain. Menurut Hirschman, daerah di suatu negara dapat dibedakan menjadi daerah kaya dan daerah miskin. Jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas balik (*trickling*

*down effects*). Sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh berarti terjadi pengkutuban (*polarization effects*).

Menurut Sjafrizal (2008), menggunakan Williamson Index sebagai ukuran ketimpangan antar wilayah. Untuk mempertajam analisa, kalkulasi indeks ketimpangan disini dibedakan antara PDRB termasuk dan diluar minyak dan gas alam. Namun demikian , karena ketersediaan data tentang pendapatan regional di Indonesia pada saat itu masih sangat terbatas, maka jangka pembahasan pada analisa juga masih terbatas sehingga generalisasi untuk mendapatkan kesimpulan umum masih sulit.

Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber, berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antardaerah dan antarsektor ekonomi suatu daerah. Bertitik tolak dari kenyataan kesenjangan/ketimpangan antardaerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. (Mudrajad Kuncoro, 2004)

## **2. Ukuran ketimpangan Pembangunan Antarwilayah**

Menurut Sjafrizal (2008), Ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat diukur dengan Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antarwilayah dan bukan

tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Formulasi Indeks Williamson secara statistik dapat ditampilkan dengan formula sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 (F_i / n)}}{Y}$$

Dimana:

IW : Indeks Williamson

$Y_i$  : PDRB Per kapita tiap Kabupaten/Kota

$Y$  : PDRB Per kapita Provinsi

$F_i$  : Jumlah Penduduk tiap Kabupaten/Kota

$n$  : Jumlah Penduduk Provinsi

Dengan menggunakan Indeks Williamson, maka dapat dilihat seberapa besar ketimpangan yang terjadi antar wilayah. Dan besaran nilai berkisar antara angka 0-1. Kriteria penilaian Indeks Williamson menurut Tambunan, (2006) :

- a) 0 s/d 0,5 tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah rendah
- b) 0,5 s/d 1 tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah tinggi

Indeks lainnya yang juga lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antarwilayah adalah Entropi Theil Index. Data yang diperlukan untuk menghitung indeks ini sama dengan yang diperlukan untuk menghitung Williamson Index yaitu PDRB per kapita dan jumlah penduduk untuk setiap wilayah. Demikian pula halnya yang dengan penafsirannya yang juga sama yaitu bila indeks mendekati 1 artinya sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 berarti sangat merata.

Menurut Ying (2000) (dikutip oleh Kuncoro 2004) untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto provinsi, menggunakan Entropi Theil. Indeks Entropi Theil tersebut dapat dibagi/diurai menjadi dua subindikasi, yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antarwilayah atau regional. Sedangkan formulasi Indeks Entropi Theil tersebut sebagai berikut :

$$I(y) = \sum (Y_j/Y) \times \log [(Y_j/Y)/(X_j/X)]$$

Dimana :

$I(y)$  : Indeks Entropi Theil

$Y_j$  : PDRB per kapita Kabupaten/Kota  $j$

$Y$  : Rata-rata PDRB per kapita Provinsi

$x_j$  : Jumlah penduduk Kabupaten/Kota  $j$

$X$  : Jumlah penduduk Provinsi

Kelebihan indeks williamson lebih mudah dan praktis untuk mengukur ketimpangan antar daerah. Namun terdapat kelemahan indeks Williamson adalah sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan. Sedangkan, Kelebihan dari indeks entropi theil yang pertama adalah indeks ini menghitung ketimpangan dalam daerah dan antardaerah secara sekaligus, sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas, yang kedua adalah indeks ini dapat pula dihitung kontribusi (dalam presentase) masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan implikasi kebijakan yang cukup penting.

## **2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi**

### **2.2.1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi**

Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah barang dan jasa meningkat. Jumlah barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara dapat diartikan sebagai nilai dari Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai PDB ini digunakan dalam mengukur persentase pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Perubahan nilai PDB akan menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Selain PDB, dalam suatu negara juga dikenal ukuran PNB (Produk Nasional Bruto) serta Pendapatan Nasional (*National Income*). Definisi PDB yaitu seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu domestik atau agregat.

Salah satu kegunaan penting dari data-data pendapatan nasional adalah untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara dari tahun ke tahun. Dalam penghitungan pendapatan nasional berdasarkan pada harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Apabila menggunakan harga berlaku, maka nilai pendapatan nasional menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perubahan tersebut dikarenakan oleh penambahan barang dan jasa dalam perekonomian serta adanya kenaikan-kenaikan harga yang berlaku dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional berdasarkan harga tetap yakni penghitungan pendapatan nasional dengan menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu (tahun dasar) yang

seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun berikutnya. Nilai pendapatan nasional yang diperoleh secara harga tetap ini dinamakan pendapatan nasional riil.

Perhitungan ekonomi biasanya menggunakan data PDB triwulanan dan tahunan. Adapun konsep perhitungan pertumbuhan ekonomi dalam satu periode (Rahardja, 2005), yaitu :

$$G_t = \frac{(PDBR_t - PDBR_{t-1})}{PDBR_{t-1}} \times 100\%$$

di mana:

$G_t$  = Pertumbuhan ekonomi periode t (triwulanan atau tahunan)

$PDBR_t$  = Produk Domestik Bruto Riil periode t (berdasarkan harga konstan)

$PDBR_{t-1}$  = PDBR satu periode sebelumnya

Jika interval waktu lebih dari satu periode maka perhitungan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan eksponensial :

$$PDBR_t = PDBR_0 (1 + r)^t$$

di mana:

$PDBR_t$  = PDBR periode t

$PDBR_0$  = PDBR periode 0

r = tingkat pertumbuhan

t = jarak periode

Perhitungan PDB dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

a) PDB menurut harga berlaku

Di mana PDB dengan faktor inflasi yang masih terkandung didalamnya.

b) PDB menurut harga konstan

Di mana PDB dengan meniadakan faktor inflasi. Artinya pengaruh perubahan harga telah dihilangkan.

Untuk menghitung besarnya pendapatan nasional atau regional, maka ada tiga metode pendekatan yang dipakai :

a) Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Metode ini dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi yang diciptakan sektor ekonomi produktif dalam wilayah suatu negara. Secara matematis :

$$NI = P_1Q_1 + P_2Q_2 + \dots + P_nQ_n$$

Di mana :

NI = PDB (Produk Domestik Bruto)

$P_1, P_2, \dots, P_n$  = Harga satuan produk pada satuan masing-masing sektor ekonomi

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$  = Jumlah produk pada satuan masing-masing sektor ekonomi

Yang dipakai hanya nilai tambah bruto saja agar dapat menghindari adanya perhitungan ganda.

b) Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Metode ini dihitung dengan menjumlah besarnya total pendapatan atau balas jasa setiap faktor-faktor produksi. Secara matematis :

$$Y = Y_w + Y_r + Y_i + Y_p$$

Di mana :

Y = Pendapatan nasional atau PDB

$Y_w$  = Pendapatan upah / gaji



- Y<sub>r</sub> = Pendapatan sewa  
 Y<sub>i</sub> = Pendapatan bunga  
 Y<sub>p</sub> = Pendapatan laba atau profit

c) Pendekatan Pengeluaran

Metode ini dihitung dengan menjumlahkan semua pengeluaran yang dilakukan berbagai golongan pembeli dalam masyarakat. Secara matematis :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Di mana :

- Y = PDB (Pendapatan Domestik Bruto)  
 C = Pengeluaran Rumah Tangga Konsumen untuk konsumsi  
 I = Pengeluaran Rumah Tangga Perusahaan untuk investasi  
 G = Pengeluaran Rumah Tangga Pemerintah  
 (X-M) = Ekspor netto atau pengeluaran rumah tangga luar negeri

**2.2.2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Terdapat beberapa teori mengenai pertumbuhan ekonomi, diantaranya:

**1. Teori Simon Kuznet**

Pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih bermanfaat apabila diiringi dengan peningkatan pemerataan pendapatan. Hipotesis Simon Kuznet menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Kuznet berpendapat bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan adalah semakin tinggi koefisien gini akan semakin rendah distribusi pendapatan (Boediono, 2008:61). Menurut Kuznet pada tahap awal pendapatan per kapita terhadap kesenjangan distribusi

pendapatan cenderung meningkat. Tahap berikutnya distribusi pendapatan bertambah tinggi hingga pada tahap akhir kesenjangan distribusi pendapatan akan menurun. Dasar dari hipotesis Kusnetz adalah ketimpangan yang rendah yang terjadi dipedesaan dengan sektor yang mendominasi adalah pertanian dibandingkan dengan perkotaan yang didominasi oleh sektor jasa dan industri yang tingkat ketimpangan pendapatannya tinggi, terjadi transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor jasa (Arsyad, 2010:292).

## **2. Teori Walt Whitman Rostow**

Menurut Rostow proses pembangunan ekonomi dibedakan ke dalam lima tahapan (Arsyad, 2004:47) yaitu:

- a. Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang fungsi produksinya terbatas yang ditandai oleh cara produksi yang relatif masih primitif yang didasarkan pada teknologi pra-Newton dan cara hidup masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional tetapi kebiasaan tersebut telah turun temurun. Menurut Rostow dalam suatu masyarakat tradisional, tingkat produktivitas per pekerja masih rendah. Oleh karena itu sebagian besar sumber daya manusia digunakan untuk sektor pertanian.
- b. Tahap prasyarat tinggal landas didefinisikan sebagai suatu masa dimana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri. Pada tahap ini dan sesudahnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis.

- c. Tahap tinggal landas, pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbukanya pasar-pasar baru. Sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut secara teratur akan tercipta inovasi-inovasi dan peningkatan investasi. Rostow mengambil kesimpulan bahwa untuk mencapai tahap tinggal landas tidak satu sektor ekonomi yang baku untuk semua negara yang bisa menciptakan pembangunan ekonomi.
- d. Tahap menuju kedewasaan diartikan sebagai masa dimana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi. Pada tahap ini sektor-sektor pimpinan baru muncul menggantikan sektor-sektor pimpinan lama yang akan mengalami kemunduran.
- e. Tahap konsumsi tinggi, pada tahap ini perhatian masyarakat telah lebih menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat bukan lagi kepada masalah produksi

### **2.2.3. Jumlah Penduduk yang Bekerja**

Pertumbuhan penduduk dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya penduduk akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi

tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (necessary condition) bagi pertumbuhan ekonomi.

Tenaga kerja secara umum adalah penduduk yang siap bekerja. Penduduk yang bekerja adalah seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.

Undang-undang No. 25 tahun 1997 menyebutkan definisi tenaga kerja yaitu setiap orang baik laki-laki maupun wanita yang sedang dalam dan atau melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja berumur 15 tahun atau lebih yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja atau punya pekerjaan yang sementara tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Berikutnya, bukan angkatan kerja adalah mereka yang selama seminggu yang lalu tidak bekerja hanya sekolah, mengurus rumah tangga, dan mereka yang tidak melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai pekerja, sementara tidak bekerja atau mencari kerja.

Musfidar (2012) dalam penelitiannya di Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa jumlah penduduk yang berumur produktif baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja, akan meningkatkan angka ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini dikarenakan proporsi jumlah penduduk yang

bekerja masih belum merata di sejumlah daerah, mereka masih banyak yang bekerja di pedesaan dibandingkan di perkotaan, sehingga terjadi perbedaan penghasilan antar mereka yang bekerja di kota dan mereka yang bekerja di desa. Mereka yang bekerja di perkotaan memiliki tingkat penghasilan yang tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang bekerja di pedesaan.

Todaro (2004) mengatakan pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian mereka yang berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan

#### **2.2.4. Pengeluaran Pemerintah**

Pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah upaya untuk memperluas kemampuan dan kebebasan memilih. Terciptanya pembangunan ekonomi sangat tergantung dari peran pemerintah yang antara lain dimanifestasikan lewat pengeluaran pemerintah. Teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi pada prinsipnya dapat digolongkan menjadi tiga golongan (Mangkoesebroto, 2008), yaitu:

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran daerah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan

tahaptahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi sangat besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin besar. Meskipun demikian, peranan pemerintah tetap besar pada tahap ini karena peranan swasta yang semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa public dalam jumlah yang lebih banyak.

Selain itu pada tahap menengah, perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor ekonomi yang makin kompleks, sehingga pemerintah harus turun tangan untuk melindungi penduduk dari eksternalitas negatif suatu sektor dan melindungi buruh dalam meningkatkan kesejahteraannya. Musgrave juga berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, persentase investasi swasta terhadap PDB akan semakin besar dan sebaliknya persentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana kepada

pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.

## 2. Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB yang semakin besar, yaitu dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan “The Law of Expanding State Expenditure”. Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris terhadap negara-negara maju. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang public. Wagner hanya mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lain.

## 3. Teori Peacock and Wiseman

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu

pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena

Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi (PDB) menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Peningkatan PDB dalam keadaan normal menyebabkan penerimaan pemerintah menjadi semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Apabila dalam keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena perang, maka pemerintah harus memperbesar penerimaannya untuk membiayai perang. Satu hal yang perlu dicatat



dari teori Peacock dan Wiseman adalah bahwa mereka mengemukakan adanya toleransi pajak, yaitu suatu limit perpajakan, akan tetapi mereka tidak menyatakan pada tingkat berapa toleransi pajak tersebut. Clarke menyatakan bahwa limit perpajakan adalah sebesar 25 persen dari pendapatan nasional. Apabila limit dilampaui maka akan terjadi inflasi dan gangguan lainnya

#### **2.2.5. Investasi**

Investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menambah modal serta memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Investasi yang terkonsentrasi hanya di beberapa daerah akan menjadi salah satu faktor penyebab adanya ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan, hanya daerah-daerah yang dinilai mendapatkan keuntungan yang menjanjikan yang akan dilirik oleh para investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri.

Menurut Sukirno (2010) investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dalam praktiknya, usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (atau pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran berikut (Sukirno, 2010):

- 1) Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
- 2) Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya.
- 3) Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, barang mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional.

Ada dua peran investasi dalam makro ekonomi yakni yang pertama, karena merupakan komponen pengeluaran yang cukup besar dan tidak mudah habis, perubahan besar dalam investasi akan sangat mempengaruhi permintaan agregat dan akhirnya berakibat juga pada output dan kesempatan kerja. Selain itu, investasi mendorong terjadinya akumulasi modal. Penambahan stok bangunan gedung dan peralatan penting lainnya akan meningkatkan output potensial suatu bangsa dan merangsang pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang. Dengan demikian, investasi memainkan dua peran yakni mempengaruhi output jangka pendek melalui dampaknya terhadap permintaan agregat dan mempengaruhi laju pertumbuhan output jangka panjang melalui dampak pembentukan modal terhadap output potensial dan penawaran agregat. Faktor penentu investasi menurut Samuelson dan Nordhaus (1996) yakni:

- 1) Hasil penjualan

Suatu kegiatan investasi akan memberikan tambahan hasil penjualan bagi perusahaan hanya bila investasi ini membuat perusahaan mampu menjual lebih banyak. Ini berarti faktor penentu yang sangat penting bagi investasi adalah tingkat output secara keseluruhan. Bila pabrik-pabrik beroperasi dibawah kapasitas normalnya, perusahaan-perusahaan tidak begitu berkeinginan membangun pabrik baru, sehingga tingkat investasi akan rendah. Secara umum investasi akan bergantung pada hasil penjualan yang akan diperoleh dari seluruh kegiatan ekonomi

## 2) Biaya/Bunga

Faktor penentu kedua terhadap tingkat investasi adalah biaya investasi. Karena barang-barang berumur panjang, maka analisa biaya investasi lebih rumit daripada biaya komoditi lain seperti batubara dan gandum. Bila membeli barang berumur panjang, kita harus menghitung harga dari modal itu, dalam hal ini dinyatakan dalam tingkat bunga pinjaman. Investor seringkali menaikkan dana untuk membeli barang-barang modal dengan melakukan pinjaman.

## 3) Ekspektasi

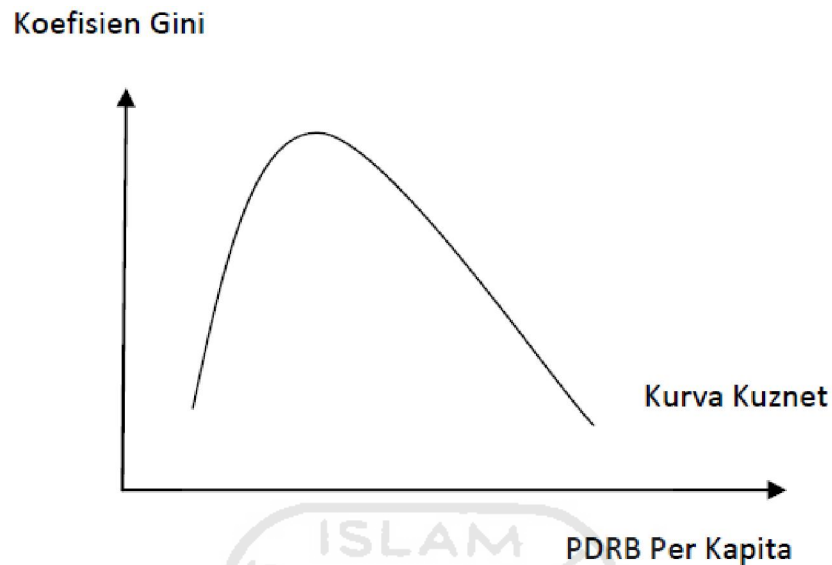
Unsur ketiga yang ikut mempengaruhi investasi adalah kadar ekspektasi dan kepercayaan dunia usaha. Pada hakikatnya investasi boleh dikatakan sebagai perjudian mengenai masa depan, dengan taruhan bahwa hasil investasi akan lebih besar daripada biayanya. Jadi keputusan investasi tergantung juga pada ekspektasi akan situasi masa

depan namun seperti banyak dikatakan orang masa depan sangat sulit untuk diramalkan

## **2.5. Hipotesis Kuznet**

Simon Kuznets dalam Kuncoro (2006) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai maka distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu maka distribusi pendapatan akan merata. Menurut Kuznet pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya.

Simon Kuznet mengatakan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, dan tahap selanjutnya distribusi pendapatannya akan membaik, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan disparitas lagi dan akhirnya menurun lagi. Hal tersebut seperti digambarkan dalam kurva Kuznet



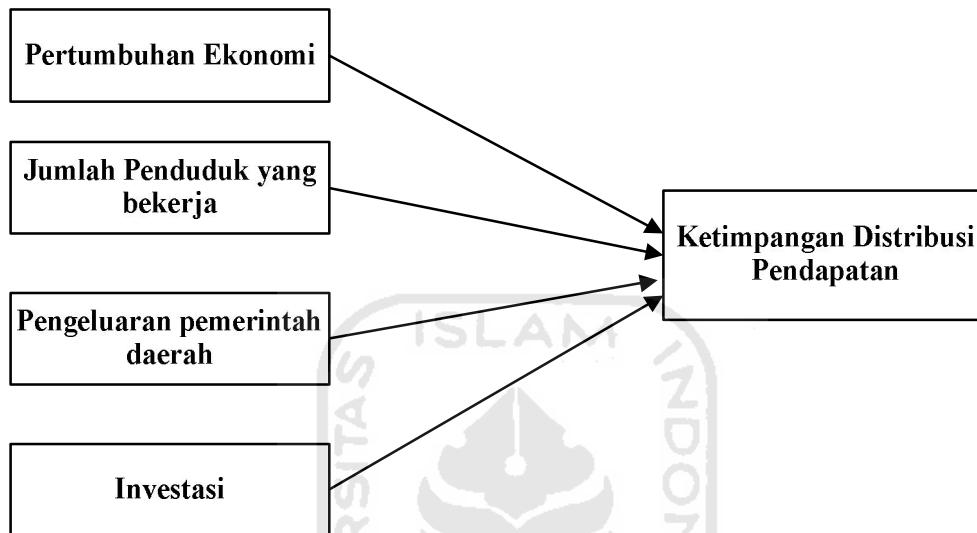
Gambar 2.1. Grafik Kuznet

pada gambar 2.1, menunjukkan bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan disparitas pendapatan, namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi negatif. Kuznets mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang ditemui hampir diseluruh negara maju, yaitu sebagai berikut :

- a. Tingkat pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi
- b. Tingkat kenaikan produktifitas faktor total yang tinggi
- c. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi
- d. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi
- e. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.

## 2.6. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian telaah penelitian sebelumnya dan kajian teori maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

## 2.6. Hubungan Antar Variabel

### 2.6.1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah (Kuncoro dan Mudrajat 2004)

Menurut Haris (2014) ketimpangan pada negara sedang berkembang relatif lebih tinggi karena pada waktu proses pembangunan baru dimulai, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh

daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik sedangkan daerah yang masih terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan prasarana dan sarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itulah, pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat di daerah dengan kondisi yang lebih baik, sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan.

Hasil penelitian Putri, Amar dan Aimon (2012) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Dengan arti kata bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di suatu daerah akan tetapi tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah lain maka akan menyebabkan ketimpangan pembangunan menjadi semakin tinggi, hal ini terjadi karena pada awal awal pembangunan pelaku ekonomi suka berinvestasi pada daerah - daerah yang relatif maju sebab infrastruktur lengkap, banyak tenaga kerja yang terlatih, peluang bisnis tersedia sehingga daerah yang tadinya juga sudah maju akan semakin maju dan keadaan ini akan mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi daerah maju.

#### **2.6.2. Hubungan Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Ketimpangan Pendapatan**

Menurut Barro (1999) pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri mengakibatkan penduduk mengalami perubahan pendapatan yang akan meningkatkan pula derajat ketimpangan distribusi pendapatan.

Pendapatan penduduk yang bekerja pada sektor industri akan jauh lebih tinggi daripada penduduk yang bekerja pada sektor pertanian.

Estudillo (1997) melakukan penelitian distribusi pendapatan di Filipina menggunakan data tahun 1961-1991 dengan hasil bahwa kenaikan proporsi populasi penduduk di perkotaan berdampak pada memburuknya distribusi pendapatan penduduk. Distribusi pendapatan seluruh penduduk merupakan kombinasi dari distribusi pendapatan penduduk perkotaan dan pedesaan. Peningkatan jumlah penduduk berusia tua akan mengurangi pendapatan rumah tangga, karena pendapatan penduduk berusia tua biasanya lebih rendah dibandingkan pendapatan penduduk usia produktif.

### **2.6.3. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Ketimpangan Pendapatan**

Peranan pemerintah yang tercermin melalui pengeluaran pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Semakin besar pengeluaran pemerintah akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat menjadi suntikkan perekonomian melalui program-program atau kegiatan untuk mendorong produktivitas sumber daya yang ada, sehingga akan mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi dalam suatu wilayah.

Hasil penelitian Dhyatmika dan Atmanti (2013) Berdasarkan hasil studi empiris, diperoleh variabel pengeluaran pemerintah (GE) untuk



pembangunan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan di kabupaten/kota Provinsi Banten pasca pemekaran wilayah.

#### **2.6.4. Hubungan Investasi dan Ketimpangan Pendapatan**

Investasi berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Keadaan demikian dapat ditunjukkan dengan banyaknya investasi pada suatu wilayah maka akan meningkatkan output yang dihasilkan sehingga nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Myrdal (Jhingan, 2004), investasi akan cenderung menambah ketidakmerataan. Pada wilayah yang sedang berkembang, permintaan barang dan jasa maka akan mendorong naiknya investasi yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan pada daerah tersebut, kemudian keadaan sebaliknya yaitu pada wilayah yang kurang berkembang, investasi akan cenderung rendah karena pendapatan masyarakatnya juga rendah. Kekuatan pasar mempunyai peran terpenting dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah dengan keuntungan yang dimiliki oleh daerah tersebut (Sjafrizal, 2008).

Harrod-Domar menjelaskan bahwa pembentukan modal/investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya, Harrod-Domar berpendapat investasi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka waktu yang lebih panjang. Dapat kita simpulkan, investasi akan berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi, kemudian dengan adanya peningkatan investasi maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, seiring dengan peningkatan

pertumbuhan tersebut maka akan berpengaruh pada ketimpangan pendapatan. Peningkatan atau penurunan investasi yang saling berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu ketimpangan pendapatan antar daerah

Hasil penelitian Dhyatmika dan Atmanti (2013) menemukan bahwa investasi dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di kabupaten/kota Provinsi Banten pasca pemekaran wilayah.

## **2.7. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kajian pustaka dan telaah penelitian terdahulu maka dapat diajukan beberapa hipotesis yaitu :

- H1 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan daerah di kabupaten/kota se propinsi DIY
- H2 : Jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan daerah di kabupaten/kota se propinsi DIY
- H3 : Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan daerah di kabupaten/kota se propinsi DIY
- H4 : Investasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan daerah di kabupaten/kota se propinsi DIY

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam pengumpulan data dan informasi empiris untuk memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian.

#### **3.1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk yang bekerja, pengeluaran pemerintah, dan investasi sebagai determinan ketimpangan pendapatan daerah kabupaten/kota se Propinsi DIY periode 2008-2014.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

- a. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder (*time series data*).
- b. Kurun waktu *time series data* adalah 6 tahun (dari tahun 2008 sampai 2014).
- c. Sumber data : Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI), serta berbagai situs yang berhubungan dengan penelitian.

#### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah dengan metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan dokumen - dokumen dari peristiwa yang lalu di dapat dari sumber yang relevan, dan melakukan pencatatan langsung mengenai data yang dipergunakan seperti data pertumbuhan ekonomi, jumlah

penduduk yang bekerja, pengeluaran pemerintah, investasi dan ketimpangan pendapatan daerah kabupaten/kota se Propinsi DIY, dalam bentuk *time series data* dari tahun 2008-2014 (7 tahun).

### **3.5. Definisi Operasional Variabel**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (terikat), empat variabel independen (bebas). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketimpangan pendapatan daerah. Sementara untuk variabel independen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk yang bekerja, pengeluaran pemerintah, dan investasi.

#### **1. Ketimpangan Pendapatan Daerah**

Ketimpangan antar wilayah diukur dengan menggunakan rumus Indeks Williamson. Indeks Williamson untuk menentukan besarnya ketimpangan pendapatan antar wilayah. Dalam Penelitian Sutarno & Kuncoro (2003), Indeks Williamson merupakan hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan berkembang. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi pada daerahdaerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi

tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Dasar perhitungan Indeks Williamson adalah pendapatan regional perkapita dan jumlah penduduk masing-masing daerah. Rumus Indeks Williamson (Sjafrizal, 2012) :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 (f_i / n)}}{Y}$$

Keterangan:

IW : Indeks Williamson

$Y_i$  : PDRB Per kapita tiap Kabupaten/Kota

$Y$  : PDRB Per kapita Provinsi DIY

$F_i$  : Jumlah Penduduk tiap Kabupaten/Kota

$n$  : Jumlah Penduduk Provinsi DIY

Dengan menggunakan Indeks Williamson, maka dapat dilihat seberapa besar ketimpangan yang terjadi antar wilayah. Dan besaran nilai berkisar antara angka 0-1. Kriteria penilaian Indeks Williamson : Jika nilai  $I_w$  menjauhi 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut semakin besar, dan jika nilai  $I_w$  mendekati 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut semakin kecil

## 2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat sehingga kemakmuran masyarakat meningkat.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diukur menggunakan logaritma natural PDRB perkapita kabupaten/kota, dengan tujuan untuk memperoleh perubahan relatif (dibandingkan tahun sebelumnya) dari PDRB perkapita. Data diambil dari Biro Pusat Statistik (BPS) di website [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

3. Jumlah Penduduk yang bekerja

Jumlah penduduk yang bekerja adalah semua orang baik laki-laki maupun wanita yang sedang dalam dan atau melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini data jumlah penduduk diambil dari data BPS melalui [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

4. Pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung sering disebut sebagai belanja pembangunan atau pengeluaran pembangunan, sedangkan belanja tidak langsung sering disebut dengan belanja atau pengeluaran rutin. Pada penelitian ini belanja langsung atau pengeluaran pembangunan dipakai untuk mencerminkan variabel pengeluaran pemerintah (GE). variabel pengeluaran pemerintah menggunakan data rasio pengeluaran pemerintah dengan satuan juta rupiah. Data pengeluaran pemerintah diambil dari data BPS melalui [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

## 5. Investasi

Dalam penelitian ini investasi yang digunakan yaitu PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Data investasi yang digunakan adalah PMA dan PMDN Kabupaten / Kota sepropinsi D.I.Yogyakarta yang telah direalisasi menurut lokasi. Satuan yang digunakan yaitu dengan satuan rupiah. Data investasi dihitung dengan melogaritma nilai PMA Dan PMDN. Sedangkan data investasi diambil dari data BPS melalui [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

### 3.5 Model Analisis

Model analisis yang digunakan dengan metode OLS (*Ordinary Least Squares*) atau Metode Kuadrat Terkecil Biasa dengan program EVIEWS. Metode OLS adalah metode analisis regresi yang paling kuat dan populer. Pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk yang bekerja, pengeluaran pemerintah dan investasi sebagai variabel-variabel independen yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan daerah sebagai variabel dependen dapat dinyatakan dalam fungsi sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4)$$

Dengan spesifikasi model ekonometrika:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu$$

Dimana:

Y = Ketimpangan pendapatan daerah

X<sub>1</sub> = Pertumbuhan Ekonomi

$X_2$	= Jumlah penduduk bekerja
$X_3$	= Pengeluaran Pemerintah
$X_4$	= Investasi
$\alpha$	= <i>intercept</i>
$\beta_1.. \beta_4$	= koefisien regresi
$\mu$	= <i>term error</i> (kesalahan pengganggu)

### 3.5.1. Uji MWD

Uji MWD (*Mackinnon, H. White and R. Davidson*) digunakan untuk menentukan model terbaik, yaitu model linier atau log linier. Persamaan matematis untuk model regresi linier dan regresi log linier adalah sebagai berikut:

Linier  $\gg Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e_i$

Log Linier  $\gg \ln Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \beta_4 \ln X_4 + e_i$

Untuk melakukan uji MWD, kita asumsikan bahwa:

$H_0$ : Y adalah fungsi linier dari variabel independen X (model linier)

$H_a$ : Y adalah fungsi log linier dari variabel independen X (model log linier)

Adapun prosedur uji MWD sebagai berikut:

1. Estimasi model linier dan dapatkan nilai prediksinya (*fitted value*) dinamai  $F_1$ . Nilai  $F_1$  dapat dicari dengan langkah sebagai berikut:
  - Lakukan regresi persamaan model linier dan dapatkan residualnya ( $RES_1$ )
  - Dapatkan nilai  $F_1 = Y - RES_1$



2. Estimasi model log linier dan dapatkan nilai prediksinya dinamai  $F_2$ .

Nilai  $F_2$  dapat dicari dengan langkah sebagai berikut:

- Lakukan regresi model log linier dan dapatkan residualnya ( $RES_2$ )
- Dapatkan nilai  $F_2 = \ln Y - RES_2$

3. Dapatkan nilai  $Z_1 = \ln F_1 - F_2$  dan  $Z_2 = \text{antilog } F_2 - F_1$

4. Estimasi persamaan berikut ini:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 Z_1 + e_i$$

Jika  $Z_1$  signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis nol sehingga model yang tepat adalah log linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis nol sehingga model yang tepat adalah linier.

5. Estimasi persamaan berikut ini:

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \beta_4 \ln X_4 + \beta_5 Z_2 + e_i$$

Jika  $Z_2$  signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis alternatif sehingga model yang tepat adalah linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis alternatif sehingga model yang tepat adalah log linier (Agus Widarjono, 2009)

Adapun keputusan hasil uji MWD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.

Keputusan Hasil Uji MWD

Hipotesis Nol ( $H_0$ )	Hipotesis Alternatif ( $H_a$ )	
	Tidak Menolak	Menolak
Tidak Menolak	Model linier dan log linier tepat	Model linier tepat
Menolak	Model log linier tepat	Model linier dan log linier tepat

Sumber: *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*, Agus Widarjono, 2009

### 3.5.2. Goodness of Fit (Uji Kesesuaian)

Untuk melihat *Goodness of Fit* dari hipotesis tersebut maka perlu dilakukan uji statistik, yaitu:

#### 1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar variasi variabel-variabel independen secara bersama-sama mampu memberi penjelasan mengenai variasi variabel dependen.

#### 2. T-test (Uji Parsial)

Uji parsial diperlukan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen secara individu dan variabel dependen signifikan atau tidak.

Rumus T-test :

$$t - \text{hitung} = \frac{(b_i - b)}{Sb_i}$$

Keterangan :

$b_i$  = Koefisien variabel independen ke-i

$b$  = Nilai hipotesis nol

$Sb_i$  = Simpangan baku dari variabel independen ke-i

Hipotesis :

$H_0 : \beta = 0$

$H_a : \beta \neq 0$

Kriteria Pengambilan Keputusan:

$H_0$  diterima apabila  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$

$H_a$  diterima apabila  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$

### 3. F-statistik (Uji Serempak)

F-statistik (Uji Serempak) diperlukan untuk mengetahui hubungan antara seluruh variabel independen secara serempak (bersama-sama) terhadap variabel independen.

Rumus T-test :

$$F - \text{hitung} = \frac{R^2 / k - 1}{(1 - R^2) / n - k}$$

Keterangan :

k = jumlah variabel + intercept

R = residual

Hipotesis :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$

Kriteria Pengambilan Keputusan:

$H_0$  diterima apabila  $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$

$H_a$  diterima apabila  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$

### 3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Model regresi yang digunakan akan menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif atau disebut BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*), apabila memenuhi asumsi dasar regresi, yaitu tidak terjadi gejala autokorelasi, heterokedastisitas dan multikolineartas diantara variabel independen dalam model regresi tersebut. Berikut penjelasan mengenai asumsi dasar klasik regresi tersebut:

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mendeteksi apakah residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Selain itu uji normalitas juga dilakukan jika sampel yang digunakan kurang dari 30. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya normalitas adalah uji *Jarque-Bera*. Hipotesis dan ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut :

$H_0$  : Residualnya berdistribusi normal

$H_a$  : Residualnya tidak berdistribusi normal

Jika nilai *probability* lebih besar dari taraf signifikan ( $\alpha = 10\%$ ) yang berarti tidak signifikan, maka menerima  $H_0$  atau menolak  $H_a$  yang berarti bahwa residualnya berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikan ( $\alpha = 10\%$ ) yang berarti signifikan, maka menolak  $H_0$  atau menerima  $H_a$  yang berarti residualnya tidak berdistribusi normal (Widarjono, 2009).

### **b. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas adalah suatu uji untuk melihat korelasi antar masing – masing variabel independen. Dalam pengujian asumsi OLS tidak terjadi multikolinieritas sehingga bisa dikatakan bahwa pengujian model tersebut bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimators*). Berarti adanya hubungan sempurna, linier dan pasti diantara atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas dilihat dari korelasi parsial ( $r$ ) antara variabel independen. Jika  $r > 0,85$  maka ada multikolinieritas dan jika  $r < 0,85$  maka tidak ada multikolinieritas (Widarjono, 2009).

### **c. Uji Autokorelasi**

Autokorelasi adalah adanya korelasi antar variabel gangguan satu observasi dengan observasi lainnya yang berlainan waktu. Autokorelasi merupakan pelanggaran asumsi penting dalam metode OLS. Metode OLS mensyaratkan tidak adanya hubungan antara variabel gangguan satu dengan variabel gangguan dengan variabel gangguan lainnya.

Pada deteksi autokorelasi dilakukan dengan menggunakan *Breusch-Godfrey serial Correlation LM test*. Uji autokorelasi dengan menggunakan metode LM diperlukan *lag* atau kelambanan. *Lag* yang dipakai dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode

*trial and error* dengan cara membandingkan nilai absolut kriteria *Akaike* dan mencari yang nilainya paling kecil. Hipotesis dan ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0$ : tidak ada masalah autokorelasi

$H_a$ : ada masalah autokorelasi

Jika nilai *probability* dari *chi-square* lebih besar dari taraf signifikan ( $\alpha = 10\%$ ) yang berarti tidak signifikan, maka menerima  $H_0$  atau menolak  $H_a$  yang artinya bahwa tidak ada masalah autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai *probability* dari *chi-square* lebih kecil dari taraf signifikan ( $\alpha = 10\%$ ) yang berarti signifikan, maka menolak  $H_0$  atau menerima  $H_a$  yang artinya bahwa ada masalah autokorelasi (Widarjono, 2009).

#### d. Uji Heterokedastisitas

Pada model OLS, untuk menghasilkan estimator yang BLUE maka diasumsikan bahwa model memiliki varian yang konstan atau  $\text{var}(e_i) = \sigma^2$ . Suatu model dikatakan memiliki masalah heteroskedastisitas jika variabel gangguan memiliki varian yang tidak konstan. Konsekuensi dari adanya masalah heteroskedastisitas adalah estimator yang kita dapatkan akan mempunyai varian yang tidak minimum. Meskipun estimator metode OLS masih linier dan tidak bias, varian yang tidak minimum akan membuat perhitungan *standard error* metode OLS tidak bisa lagi dipercayai kebenarannya. Hal ini

menyebabkan interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi t maupun F tidak lagi bisa dipercaya untuk mengevaluasi hasil regresi.

Masalah heteroskedastisitas mengandung konsekuensi serius pada estimator OLS. Karena tidak lagi BLUE. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendeteksi adanya masalah heteroskedastisitas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji *White Heteroskedasticitytest*. Hipotesis dan ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut :

$H_0$  : tidak ada masalah heteroskedastisitas

$H_a$  : ada masalah heteroskedastisitas

Jika nilai *probability* dari *chi-square* lebih besar dari taraf signifikan ( $\alpha = 10\%$ ) yang berarti tidak signifikan, maka menerima  $H_0$  atau menolak  $H_a$  yang artinya bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai *probability* dari *chi-square* lebih kecil dari taraf signifikan ( $\alpha = 10\%$ ) yang berarti signifikan, maka menolak  $H_0$  atau menerima  $H_a$  yang artinya bahwa ada masalah heteroskedastisitas (Widarjono, 2009).

## **BAB IV**

### **ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk yang bekerja, pengeluaran pemerintah dan investasi pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY periode tahun 2008 – 2014. Analisis data dilakukan melalui dua tahap analisis yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Analisis deskriptif menjelaskan gambaran seluruh data-variabel penelitian di Kabupaten/kota se propinsi Yogyakarta dari tahun 2008– 2014. Sedangkan analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dalam bab sebelumnya

#### **4.1 Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif menjelaskan seberapa besar tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY periode tahun 2008 – 2014. Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan daerah digunakan Indeks Williamson. Menurut Sjafrizal (2008), Ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat diukur dengan Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antarwilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.



Hasil perhitungan Indeks Williamson antar kabupaten/kota di Regional

DIY dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Ketimpangan Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota Propinsi DIY

	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta	Rata2	Kategori
2008	0.30027	0.41569	0.37385	0.38119	0.26808	0.34782	Rendah
2009	0.30731	0.41578	0.37323	0.38977	0.24908	0.34704	Rendah
2010	0.30716	0.41672	0.37203	0.39181	0.24755	0.34706	Rendah
2011	0.30682	0.41580	0.37241	0.39308	0.24651	0.34692	Rendah
2012	0.30679	0.41611	0.37254	0.39276	0.24625	0.34689	Rendah
2013	0.30517	0.40107	0.37189	0.34253	0.22996	0.33012	Rendah
2014	0.30527	0.40140	0.37217	0.34201	0.22994	0.33016	Rendah
<b>Rata-rata</b>	<b>0.30554</b>	<b>0.41180</b>	<b>0.37259</b>	<b>0.37617</b>	<b>0.24534</b>	<b>0.34229</b>	<b>Rendah</b>

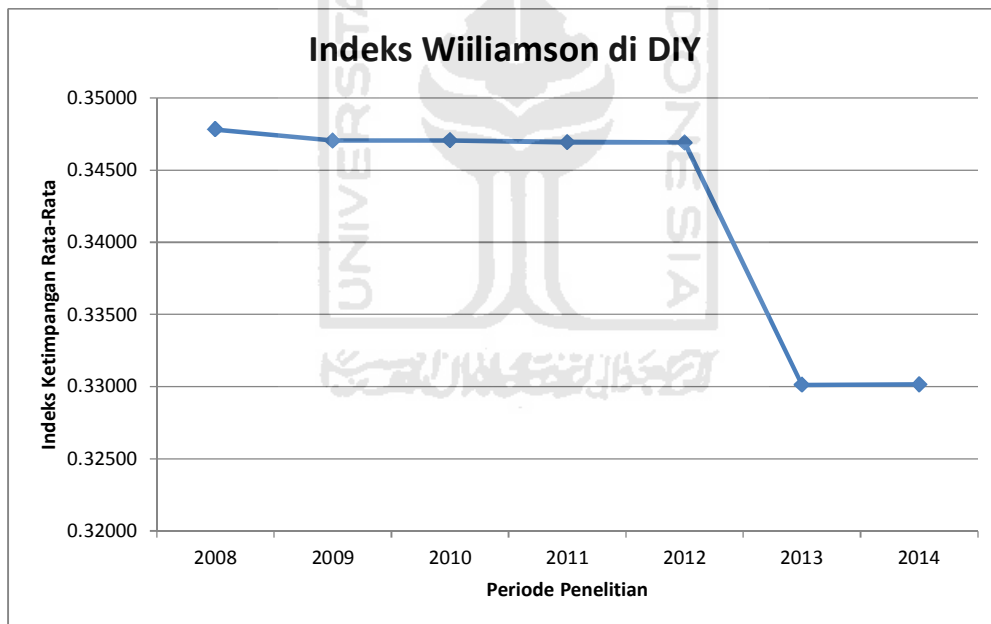
Sumber : Data Sekunder diolah, 2016

Berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai Indeks Williamson pada tahun 2008 – 2014, rata-rata ketimpangan Regional di DIY sebesar 0,34229. Di tahun 2008 nilai indeks kesenjangan Williamson 0,34782, tahun berikutnya (tahun 2009) sedikit turun menjadi 0,34704, tahun 2010 naik menjadi sebesar 0,34706, tahun 2001 turun lagi menjadi sebesar 0,34692, dan seterusnya secara beruntun dari tahun 2012 hingga tahun 2014 mengalami penurunan yang konsisten yaitu sebesar 0,34689 (tahun 2012), 0,33012 (tahun 2013) dan 0,33016 (tahun 2014). Secara rata-rata indeks Williamson sebesar 0,34229 menunjukkan bahwa kategori indeks ini berada pada interval 0 - 0,5 yaitu termasuk dalam ketimpangan pendapatan yang rendah.

Secara umum nilai Indeks Ketimpangan Williamson Regional di DIY selama periode 2008 – 2014 mengalami kecenderungan penurunan. Ketimpangan yang terus menurun disebabkan antara lain oleh berkembangnya secara merata

kegiatan ekonomi antar wilayah, Alokasi investasi yang sudah merata, tingkat mobilitas faktor produksi yang tinggi antar daerah, pemantaatan Sumber Daya Alam (SDA) antar wilayah, kondisi geografis antar wilayah serta sudah lancarnya perdagangan antar propinsi.

Indeks Kesenjangan Williamson yang terjadi di Regional di DIY pada tahun 2008 – 2014 menunjukkan bahwa perubahan angka yang cukup kecil dan menunjukkan hasil yang berarti bagi penurunan ketimpangan pendapatan di DIY, bahkan cenderung mengalami penurunan. Grafik kecenderungan ini dapat dilihat pada Gambar 4.1



Dari grafik nilai Indeks Kesenjangan Williamson di Regional di DIY di atas jika dilihat secara rata-rata Indeks Williamson selama tahun pengamatan 2008 – 2014 mengalami ketimpangan yang cukup rendah dan cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan antar daerah Kabupaten/kota di Propinsi Daerah sudah cukup merata. Hal ini

disebabkan karena pada tahun 2008-2014 pemerintah propinsi DIY memberlakukan Otonomi Daerah yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri tanpa ada lagi intervensi dari pemerintah pusat, sehingga masing-masing daerah di Propinsi DIY harus dapat mengembangkan daerahnya sendiri. Namun demikian disisi lain sumber pendapatan yang berasal dari bantuan pemerintah pusat juga cukup besar, melalui DAU dan DAK sehingga pemerintah daerah mampu melakukan pembangunan daerahnya dengan baik.

Suatu daerah harus memiliki kemampuan keuangan atau kapasitas fiskal daerah, seperti: sumber daya alam, potensi daerah, kaadaan alam, dan kemampuan sumber daya manusia tiap-tiap daerah. Hal itu penting sekali karena sangat menentukan pendapatan daerah, jadi setiap daerah harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri. Di Kabupaten/kota se propinsi DIY telah memiliki kelebihan sendiri-sendiri atas potensi yang dimiliki daerah. Sebagai contoh untuk kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, pendapatan daerah berkembang didukung atas sektor industri yang cukup baik, seperti industri jasa perhotelan dan pariwisata, maupun industri retail yang ditunjukkan dengan maraknya pertokoan dan mall. Sementara daerah yang lain seperti Gunung Kidul terkenal dengan potensi obyek wisatanya, Kabupaten Bantul dengan industri UKM, begitu juga dengan daerah Kulon Progo. Sehingga pendapatan yang dihasilkan oleh tiap -tiap daerah berbeda-beda sesuai dengan potensinya. Daerah yang memiliki pendapatan tinggi maka daerah tersebut akan maju, namun daerah yang memiliki pendapatan yang

rendah maka daerah tersebut akan tertinggal dari daerah lain, namun perbedaan yang terjadi masih relatif kecil.

#### 4.2. Pemilihan Model Regresi

Dari perhitungan dengan menggunakan metode MWD dengan bantuan komputer diperoleh hasil :

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji MWD Linier**

Included observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.033451	0.012483	2.679674	0.0120
X2	-0.070423	0.160240	-0.439487	0.6636
X3	-0.000121	2.91E-05	-4.144011	0.0003
X4	-0.004001	0.010864	-0.368268	0.7153
Z1	-0.153853	0.101666	-1.513312	0.1410
C	0.328076	0.174571	1.879326	0.0703

Nilai t hitung koefisien Z1 = -1.513312 dengan probabilitas sebesar 0,1410. Hal ini berarti probabilitas (p) sebesar 0,1410 > 0,05. Dengan demikian variabel Z1 adalah tidak signifikan secara statistik melalui uji t sehingga harus menerima  $H_0$  dan menolak  $H_a$ , artinya bahwa model adalah linier dapat diterima.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji MWD Log Linier**

Included observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNX1	0.393081	0.127415	3.085051	0.0044
LNX2	-0.179923	0.188532	-0.954334	0.3478
LNX3	-0.215678	0.042780	-5.041512	0.0000
LNX4	-0.012720	0.026102	-0.487310	0.6297
Z2	0.782565	0.350987	2.229614	0.0337
C	-0.353540	0.446333	-0.792100	0.4347

Nilai t hitung  $Z_2 = 2,229614$  sedangkan nilai kritis table t pada  $\alpha = 5\%$  dengan df 29 adalah 2.045. Hal ini berarti t hitung  $>$  t tabel, dan didukung dengan probabilitas (p) sebesar  $0,0337 < 0,05$ . Dengan demikian variabel  $Z_2$  adalah signifikan secara statistik melalui uji t sehingga menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ , artinya bahwa model adalah log linier tidak dapat diterima.

Kesimpulannya berdasarkan hasil regresi linier dan log linier menunjukkan bahwa model linier lebih baik dalam menjelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY periode tahun 2008 – 2014, sehingga model linier dapat digunakan.

#### **4.3. Analisis Regresi Linier Berganda (*Ordinary Least Square*)**

Analisis regresi linier berganda merupakan bentuk model persamaan untuk analisis Pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk yang bekerja, pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY periode tahun 2008 – 2014,

Berdasarkan regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan program komputer E.Views 8 yaitu Metode OLS (*Ordinary Least Square*) diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

Tabel 4.4. Hasil Estimasi Regresi

Included observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.307092	0.177722	1.727936	0.0943
X1	0.028411	0.012287	2.312371	0.0278
X2	-0.061619	0.163541	-0.376778	0.7090
X3	-0.000118	2.97E-05	-3.963905	0.0004
X4	-0.000754	0.010877	-0.069302	0.9452
R-squared	0.555870	Mean dependent var		0.342286
Adjusted R-squared	0.496653	S.D. dependent var		0.061408
S.E. of regression	0.043567	Akaike info criterion		-3.297477
Sum squared resid	0.056942	Schwarz criterion		-3.075285
Log likelihood	62.70586	Hannan-Quinn criter.		-3.220777
F-statistic	9.386959	Durbin-Watson stat		1.748505
Prob(F-statistic)	0.000048			

Persamaan regresi :

$$Y = 0,307092 + 0,028411X_1 - 0,061619 X_2 - 0,000118 X_3 - 0,000754X_4$$

Dari persamaan regresi yang telah diperoleh maka dapat dibuat interpretasi terhadap model ataupun hipotesa yang telah diambil sebelumnya. Adapun hasil interpretasi adalah sebagai berikut:

Konstanta sebesar 0.307092 menunjukkan bahwa ketimpangan daerah di Propinsi DIY akan sebesar 0,307092 jika tidak ada perubahan pada pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk yang bekerja, pengeluaran pemerintah dan investasi. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se DIY. Hal ini dapat dilihat dari koefisien  $X_1$  sebesar 0,028411 yang artinya bahwa setiap

kenaikan 1 % pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan peningkatan ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se DIY sebesar 0,0028411, dengan asumsi *ceteris paribus*. Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se DIY. Hal ini dapat dilihat dari koefisien  $X_3$  sebesar -0,000118 yang artinya bahwa setiap kenaikan 1 juta rupiah pengeluaran pemerintah per penduduk akan mengakibatkan penurunan ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se DIY sebesar 0,000118, dengan asumsi *ceteris paribus*.

Sedangkan untuk jumlah penduduk yang bekerja dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan daerah. Hal ini berarti kenaikan dan penurunan jumlah penduduk yang bekerja dan investasi pada suatu daerah tidak menyebabkan peningkatan ketimpangan suatu daerah.

#### 4.2.1. Uji t (Pengujian secara parsial)

##### 1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY

Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY. Hal ini dapat dilihat dari hasil T-test (uji parsial) sebesar 2,312371 dan probabilitas sebesar 0,0278. Angka tersebut menunjukkan bahwa probabilitas  $< 0,05$  yaitu  $0,0278 < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada

pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan “Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan daerah di kabupaten/kota se propinsi DIY” **didukung**.

## **2. Pengaruh Jumlah Penduduk yang bekerja terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY**

Jumlah penduduk yang bekerja mempunyai pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY. Hal ini dapat dilihat dari t statistik = -0.376778 dan probabilitas sebesar 0,7090. Angka tersebut menunjukkan bahwa probabilitas  $> 0,05$ . Hal ini berarti bahwa variabel Jumlah penduduk yang bekerja tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan “Jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan daerah di kabupaten/kota se propinsi DIY” **tidak didukung**.

## **3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY**

Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY. Hal ini dapat dilihat dari t-statistik = -3,963905 dan probabilitas sebesar



0,0004. Angka tersebut menunjukkan bahwa probabilitas  $< 0,05$ . Hal ini berarti bahwa variabel Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan “Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan daerah di kabupaten/kota se propinsi DIY ” **didukung**.

#### **4. Pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY**

Tingkat investasi mempunyai pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY. Hal ini dapat dilihat dari t-statistik =  $-0,069302$  dan probabilitas sebesar  $0,9452$ . Angka tersebut menunjukkan bahwa probabilitas  $> 0,05$ . Hal ini berarti bahwa variabel investasi tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan “Investasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan daerah di kabupaten/kota se propinsi DIY” **didukung**.

#### **4.2.2. Uji F (Uji Serentak)**

Untuk mengetahui apakah variabel pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk yang bekerja, pengeluaran pemerintah dan investasi, secara bersama-sama mempengaruhi ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten di Propinsi DIY digunakan F-test

Adapun langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesa

Ho :  $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$  artinya variabel bebas secara serempak tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas.

Ha :  $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ : artinya variabel bebas secara serempak berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas.

2. Dengan menggunakan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 0,05

3. Kriteria pengujian :

Ho diterima apabila: Sig F > 0,05

Ho ditolak apabila : Sig F  $\leq$  0,05

4. Hasil perhitungan komputer diperoleh F hitung = 9,386959 dan sig sebesar 0,000048

5. Kesimpulan:

Berdasarkan hasil uji statistik di atas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000048 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti variable pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk yang bekerja, pengeluaran pemerintah dan investasi secara serempak berpengaruh signifikan terhadap variable ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY.

#### 4.2.3. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Dari hasil regresi didapat nilai R<sup>2</sup> sebesar 0.555870. Hal ini menggambarkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama

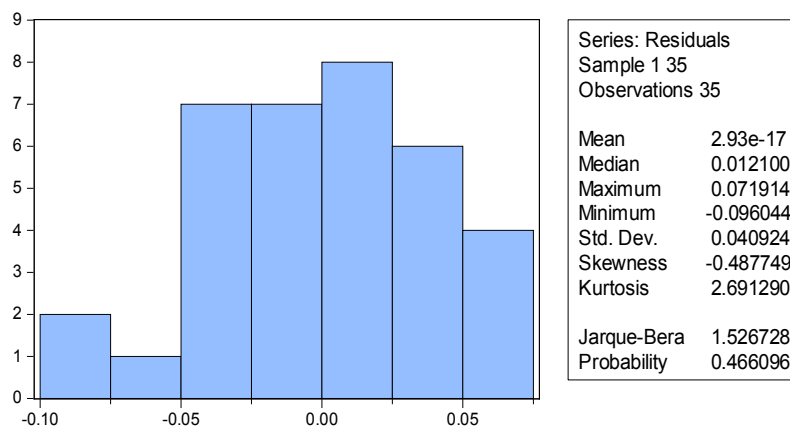
mampu memberi penjelasan mengenai variabel dependen sebesar 55,58%. Adapun 44,42% lagi dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model atau dijelaskan dalam *term of error* (  $e$  ).

#### 4.2.4. Uji Asumsi Klasik

Setelah dilakukan pengujian hipotesis (Uji t dan Uji F), selanjutnya dilakukan evaluasi ekonometrik dengan uji asumsi klasik agar hasil kesimpulan yang diperoleh tidak menimbulkan nilai yang bias. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi Uji Normalitas, Uji Linieritas, Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedastisitas.

##### a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah terdistribusi secara normal. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan uji Jarque Bera Test. Data dinyatakan normal jika memiliki nilai probabilitas  $> 0,05$ . Hasil uji kolmogorov smirnov dapat ditunjukkan pada Tabel berikut:



Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas

Dari Gambar 4.1 di atas dapat diketahui bahwa nilai Jarque Bera Test adalah sebesar 1,526728 dan probabilitas adalah sebesar 0,466 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

**b. Uji Heteroskedastisitas**

Salah satu asumsi klasik mengenai regresi linier adalah bahwa komponen pengganggu ( $e_i$ ) harus mempunyai varians yang sama, dan jika asumsi tidak bisa maka terjadilah heteroskedastisitas ini dapat dideteksi dengan menggunakan Uji Glejser Test, yaitu dengan cara meregresi residual kuadrat ( $U_i^2$ ) dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Hasil perhitungan terlihat pada rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Heterokedasitas**

Parameter	$\chi^2$ hitung	Probability	Keterangan
Obs*R_sqaured	14.29930	0.4277	Tdk ada heterokedasitas

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Hasil uji heteroskedastisitas (*no cross term*) menunjukkan nilai Obs\*R-square hitung atau  $\chi^2$  hitung adalah 14,29930 dan probabilitas sebesar 0,4277 > 0,05, dengan demikian tidak terdapat heteroskedastisitas.

**c. Autokorelasi**

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat adanya autokorelasi antara variabel bebas yang diurutkan berdasarkan waktu. Pengujian

autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Breusch-Godfrey* Serial Correlation LM Test. Kriteria pengujian adalah apabila nilai probabilitas > 0,05, maka menerima hipotesis nol (Ho) yang mengatakan bahwa tidak ada autokorelasi. Berikut ini hasil dari uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test sebagaimana ditampilkan pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.6. Hasil Uji Autokorelasi dengan Breusch-Godfrey Serial

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.142107	Prob. F(1,29)	0.7089
Obs*R-squared	0.170672	Prob. Chi-Square(1)	0.6795

Hasil uji LM test di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai  $X^2$  hitung (Obs\*R-squared) = 0,170672 dengan probability 0,6795 > 0,05 yang berarti tidak signifikan. Dengan demikian hipotesis nol (H0) yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi tidak dapat ditolak. Artinya dalam model yang diestimasi tersebut tidak mengandung korelasi serial (autokorelasi) antar faktor pengganggu (error term)

#### d. Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah hubungan yang terjadi di antara variabel-variabel independen atau variabel yang satu fungsi dari variabel independen lain. Pengujian terhadap gejala multikolinieritas dengan uji korelasi. Jika koefisien korelasi lebih kecil dari 0,8, maka tidak ada multikolinieritas.

**Table 4.7. Hasil Pengujian Multikolinieritas**

Included observations: 35

Correlation Probability	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000 ----			
X2	-0.097525 0.5773	1.000000 ----		
X3	-0.417668 0.0125	-0.095439 0.5855	1.000000 ----	
X4	0.051113 0.7706	-0.286734 0.0949	0.232220 0.1795	1.000000 ----

Sumber: data diolah dengan Eviews

Dari uji multikolinieritas tersebut di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi antar variabel independen berkisar antara -0,417668 dengan 0,23220 yang seluruhnya berada dibawah 0,8. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan Daerah

Hasil penelitian menemukan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY. Hal ini berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka akan semakin meningkatkan ketimpangan daerah.

Pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara

berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah (Kuncoro dan Mudrajat 2004). Hasil penelitian Putri, Amar dan Aimon (2012) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Dengan arti kata bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di suatu daerah akan tetapi tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah lain maka akan menyebabkan ketimpangan pembangunan menjadi semakin tinggi, hal ini terjadi karena pada awal awal pembangunan pelaku ekonomi suka berinvestasi pada daerah - daerah yang relatif maju sebab infrastruktur lengkap, banyak tenaga kerja yang terlatih, peluang bisnis tersedia sehingga daerah yang tadinya juga sudah maju akan semakin maju dan keadaan ini akan mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi daerah maju

#### **4.3.2. Pengaruh Jumlah Penduduk yang bekerja terhadap ketimpangan Daerah**

Hasil penelitian penelitian menemukan Jumlah penduduk yang bekerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten di Propinsi DIY. Hal ini berarti besar kecilnya jumlah penduduk yang bekerja belum mampu menurunkan ketimpangan yang terjadi antar daerah di propinsi DIY. Hasil penelitian mendukung penelitian Adipuryanti dan Sudibia (2015) yang menemukan bahwa jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian ini bertolakbelakang

dengan penelitian Pangemanan (2001) yang menyatakan bahwa kenaikan proporsi penduduk yang bekerja dan terdidik akan meningkatkan distribusi pendapatan rumah tangga, karena ketidakmerataan distribusi pendidikan. Walaupun jumlah penduduk yang bekerja relatif cukup besar, namun sebagian besar penduduk di kota/kabupaten di DIY berstatus sebagai buruh dan karyawan swasta, yang gajinya relatif kecil sesuai dengan UMR yang ada, sehingga belum mampu menurunkan ketimpangan secara signifikan.

Selain itu jumlah penduduk yang bekerja bukan faktor utama yang menyebabkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Menurut Sukirno (1985) para ekonom klasik dan ekonom neoklasik mengemukakan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1). Jumlah penduduk (2) jumlah stok barang modal (3) luas tanah dan kekayaan alam (4) tingkat teknologi yang digunakan. Pertumbuhan perekonomian daerah dikatakan berhasil apabila tingkat kegiatan ekonomi daerah lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan dimasa lalu. Dengan demikian masih cukup banyak faktor lain yang menyebabkan ketimpangan suatu daerah. Jumlah penduduk yang bekerja belum tentu dapat meningkatkan pendapatan daerah, karena hanya ditinjau dari sisi kuantitas saja, belum dilihat secara kualitas. Sebagai contoh di Singapura, jumlah penduduk yang bekerja jumlahnya relatif sedikit dibandingkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia, tetapi pendapatannya jauh lebih besar daripada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kualitas SDMnya mereka lebih baik. Begitu juga dengan daerah-daerah di



propinsi DIY, jumlah penduduk yang bekerja belum dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan ketimpangan pendapatan suatu daerah.

Selain itu menurut Harun dan Maski (2013) menyatakan bahwa dari Dari segi tenaga kerja, perbedaan tingkat upah daerah maju dengan daerah tertinggal secara otomatis akan menimbulkan perpindahan tenaga kerja dari daerah tertinggal menuju ke daerah maju guna mencari pendapatan yang lebih tinggi, dengan demikian daerah yang tertinggal akan kehilangan tenaga kerjanya. Hal ini terbukti dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh banyak daerah maju guna membendung arus urbanisasi tidak berhasil. Dari segi keterampilan dan teknologi, pada daerah maju dengan begitu tinggi tingkat persaingan yang terjadi mendorong masyarakat di daerah tersebut untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan teknologi yang akan mendukung kegiatan ekonomi pelaku usaha sehingga akan lebih unggul dibandingkan dengan pelaku usaha yang lain, kemudian pelaku usaha yang tertinggal secara otomatis tidak ingin kalah dalam persaingan sehingga mencari cara agar dapat meningkatkan keterampilan dan teknologinya, dan kondisi ini berlangsung terus menerus. Sedangkan pada daerah yang tertinggal akan berlangsung kondisi yang stagnasi, dengan pola pikir yang tidak mau menerima perubahan bukan tidak mungkin daerah tersebut akan mengalami kemunduran.

#### **4.3.3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Daerah**

Hasil pengujian hipotesis ketiga menemukan bahwa Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten di Propinsi DIY. Hal ini berarti semakin

besar Pengeluaran pemerintah maka semakin rendah ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY. Peranan pemerintah yang tercermin melalui pengeluaran pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Semakin besar pengeluaran pemerintah akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat menjadi suntikkan perekonomian melalui program-program atau kegiatan untuk mendorong produktivitas sumber daya yang ada, sehingga akan mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi dalam suatu wilayah.

Hasil penelitian Dhyatmika dan Atmanti (2013) yang menemukan hasil studi empiris, diperoleh variabel pengeluaran pemerintah (GE) untuk pembangunan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan di kabupaten/kota Provinsi Banten pasca pemekaran wilayah

#### **4.3.4. Pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan Daerah**

Hasil analisis menemukan bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY. Hal ini berarti besar kecilnya investasi yang ada di propinsi DIY belum mampu menurunkan ketimpangan pendapatan antar daerah. Hasil penelitian sesuai dengan temuan penelitian Dhyatmika dan Atmanti (2013) yang menemukan investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian Wahyuni, dkk.

(2014), dimana investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali

Adanya hasil yang bertentangan ini kemungkinan disebabkan karena jenis investasi dalam usaha di Yogyakarta ini masih relatif usaha-usaha yang menengah kebawah seperti untuk investasi UMKM, sehingga belum memberikan dampak secara signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan daerah. Hal ini sependapat dengan pendapat Mokodompis dkk (2014) yang menyatakan tidak signifikannya investasi khususnya PMA, disebabkan karena pengembangan Penanaman Modal Asing (PMA) masih terhambat oleh rumitnya pengurusan perijinan akibat birokrasi yang berbelit-belit serta kurangnya keterpaduan koordinasi antar departemen yang terkait, kurang tersedianya fasilitas pendukung seperti transportasi, tenaga kerja terampil, dan teknologi. Sehingga investor asing kurang berminat untuk menanamkan modalnya secara merata pada Kota/ Kabupaten di Yogyakarta. Investor hanya memilih pada daerah-daerah tertentu saja yang sekiranya memiliki potensial. Dengan berbagai keuntungan yang dapat diberikan oleh penanaman modal asing tidaklah berarti bahwa kehadiran modal asing akan sepenuhnya menjamin kesuksesan pembangunan ekonomi. Penanaman modal asing dapat juga menimbulkan beberapa hal yang tidak menguntungkan pembangunan ekonomi. Jika dalam jangka pendek modal asing melakukan penanaman modalnya tidak di sektor produktif melainkan di sektor moneter yang bersifat spekulatif kemudian modal dan hasilnya di bawah ke luar negeri maka akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan

ekonomi. Demikian juga, dalam jangka panjang modal asing dapat memperburuk masalah kekurangan mata uang asing, yaitu apabila hasil-hasil mereka tidak diekspor atau tidak menggantikan barang-barang impor dan mereka mengimpor bahan mentah dari luar negeri dan mengirimkan keuntungan yang diperoleh kepada perusahaan induk di luar negeri (Mokodompis dkk, 2014)



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY periode tahun 2008 – 2014 termasuk dalam kriteria yang rendah. Hasil analisis rata-rata Indeks Williamson selama tahun pengamatan 2008 – 2014 mengalami ketimpangan yang cukup rendah dan cenderung mengalami penurunan. Rata-rata indeks williamson sebesar 0,34229 menunjukkan bahwa kategori indeks ini berada pada interval 0 - 0,5 yaitu termasuk dalam ketimpangan pendapatan yang rendah.
2. Hasil penelitian menemukan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY. Hal ini berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka akan semakin meningkatkan ketimpangan daerah.
3. Hasil penelitian menemukan Jumlah penduduk yang bekerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten di Propinsi DIY. Hal ini berarti besar kecilnya jumlah penduduk yang bekerja belum

mampu menurunkan ketimpangan yang terjadi antar daerah di propinsi DIY.

4. Hasil pengujian hipotesis ketiga menemukan bahwa Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten di Propinsi DIY. Hal ini berarti semakin besar Pengeluaran pemerintah maka semakin rendah ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY.
5. Hasil analisis menemukan bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY. Hal ini berarti besar kecilnya investasi yang ada di propinsi DIY belum mampu menurunkan ketimpangan pendapatan antar daerah.

## **5.2 Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu:

1. Untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan maka saran yang dapat diberikan hendaknya pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi DIY. Selanjutnya pemerintah daerah diharapkan mampu mengarahkan pengembangan infrastruktur kepada kabupaten-kabupaten yang selama ini tingkat pembangunannya masih

tertinggal dengan mengalokasikan pengeluaran / belanja daerah yang lebih besar.

2. Kedua, pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan kualitas tenaga kerja di masing-masing kabupaten/kota di DIY, sehingga mampu merumuskan kebijakan untuk merangsang dunia usaha agar peluang usaha semakin terbuka sehingga kebutuhan akan tenaga kerja bertambah dan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Yogyakarta akan semakin berkurang seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini penting karena pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adipuryantil Ni Luh Putu Yuni, I Ketut Sudibia, 2015, Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali, *Piramida Vol. XINo. 1 : 20 – 28*
- Arsyad, Lincolin. 1999. Ekonomi Pembangunan. Ed. 3, Yogyakarta. Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Barro, Robert J. 1999. *Inequality, Growth, And Investment*. NBER Working Paper , No. 7038. Cambridge
- Dhyatmika Ketut Wahyu, Hastarini Dwi Atmanti, 2013, Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran, Diponegoro Journal Of Economics, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, p: 1- 8
- Estudillo, Jonna P. 1997. Income Inequality In The Philippines 1961-91. *The Developing Economics. 35 (1), pp: 68-95. University of Hawaii.*
- Gujarati. 2005. *SPSS Versi 16 Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama
- Harun Lukman dan Ghozali Maski (2013), Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur), *ejournal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*
- Haris, Muhammad. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012. *Skripsi Sarjana Jurusan IESP pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang*
- Hirschman, Albert O. 1973. *The strategy of Economic Development*. Sixteenth Printing, Yale University Press.
- Jhingan, M.L. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta : Penerbit Erlangga, Jakarta
- Lili, Masli, 2008, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi



Jawa Barat. Jawa Barat, *e journal Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)*

- Mangkoesebroto, G, 2008, *Ekonomi Publik*, Edisi Ketiga, BPFE Yogyakarta.
- Mokodompis Rafika ,Vekie Rumatte Dan Mauna Maramis (2014), Pengaruh Tingkat Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kota Manado Tahun 2003-2012), *Jurnal Berkala Efisiensi*
- Musfidar, Ma'mun. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010. *Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makasar*
- Myrdal, Gunnar., 1957, *Economic Theory and Underdeveloped Regions*. London: Duckworth
- Putra Linggar Dewangga, Achma Hendra Setiawan, 2009, Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000 – 2007, *e-journal Universitas Diponegoro Semarang*
- Putri Yosi Eka, Syamsul Amar, Hasdi Aimon, 2012, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia, *Ejournal.Universitas Negeri Padang*
- Rahardja, Prathama. Manurung, Mandala. 2005. *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Samuelson, Paul A. Dan Nordhaus William D. 1996. *Makro Ekonomi*. Edisi ke-17. Cetakan ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Sukirno, Sadono, 2010, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Kebijakan*, Jakarta: Kencana
- Sultan, Jamzani Sodik, 2010, Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional Di Diy-Jawa Tengah Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Periode (2000- 2004), *Buletin Ekonomi Vol. 8, No. 1, April 2010 hal 1-70*
- Sutarno dan Kuncoro. 2003. *Perumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 1993-2000*
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Baduose Media CetakanPertama.Padang

Tambunan, Tulus. 2006. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Gahlia Indonesia

Todaro, Michael dan Smith, Stephen. (2004). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. (Terjemahan) Erlangga: Jakarta



# LAMPIRAN

## DATA LAJU PDRB / PERTUMBUHAN EKONOMI (%)

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2008	4.71	4.90	4.39	5.13	5.12
2009	3.97	4.47	4.14	4.48	4.46
2010	3.06	4.97	4.15	4.49	4.98
2011	4.23	5.07	4.52	5.42	3.84
2012	4.37	5.33	4.84	5.79	3.40
2013	4.87	5.46	4.97	5.89	3.47
2014	4.55	5.15	4.54	5.41	3.30

## DATA JUMLAH PENDUDUK (JIWA)

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta	Prop. DIY
2008	374,783	909,812	686,772	1,040,220	456,915	3,468,502
2009	387,493	899,312	675,474	1,074,673	389,685	3,426,637
2010	388,755	910,572	674,408	1,090,567	388,088	3,452,390
2011	394,200	922,104	685,003	1,116,184	392,506	3,509,997
2012	398,672	934,674	692,579	1,128,943	397,594	3,552,462
2013	403,179	947,072	700,191	1,141,733	402,679	3,594,854
2014	407,709	959,445	707,794	1,154,501	407,667	3,637,116

**DATA PDRB (JUTA  
RUPIAH)**

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta	Prop. DIY
2008	1,662,370	3,618,060	3,070,298	5,838,246	5,021,149	19,208,938
2009	1,728,304	3,779,948	3,197,365	6,099,557	5,244,851	20,064,257
2010	1,781,227	3,967,928	3,330,080	6,373,200	5,505,942	21,042,267
2011	1,869,338	4,177,201	3,474,288	6,704,100	5,816,568	22,129,707
2012	1,963,028	4,400,313	3,642,562	7,069,229	6,151,679	23,309,218
2013	5,741,660	14,138,720	10,177,430	25,367,410	20,239,560	64,678,968
2014	6,002,790	14,867,410	10,639,470	26,740,540	21,312,140	68,049,874

**DATA JUMLAH PENDUDUK YANG  
BEKERJA (JIWA)**

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta	Prop. DIY
2008	214,012	496,646	377,482	591,138	212,927	1,892,205
2009	214,402	497,549	378,168	592,214	213,314	1,895,647
2010	203,425	472,076	358,807	561,894	202,393	1,798,595
2011	203,425	472,076	358,807	561,894	202,393	1,798,595
2012	218,042	488,773	414,815	544,438	201,640	1,867,708
2013	228,572	472,808	420,454	568,419	195,818	1,886,071
2014	236,536	424,669	236,536	590,080	216,024	1,956,043

**DATA PMA (RUPIAH)**

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2008	1,400,000,000	4,179,439,000	42,563,581,000	573,412,187,214	341,118,082,613
2009	3,890,000,000	4,179,439,000	44,367,500,000	632,212,187,214	344,218,082,613
2010	380,267,544,443	762,859,433,004	163,554,190,000	3,240,000,000,000	56,366,500,000
2011	3,240,000,000	210,029,432,200	103,710,644,400	2,440,345,582,900	1,809,825,811,900
2012	3,420,500,000	249,117,080,000	107,043,970,000	2,529,051,370,000	1,833,724,330,000
2013	3,078,450,000	226,255,372,675	96,339,580,000	2,720,103,359,364	2,157,338,880,844
2014	378,473,808,942	253,292,293,711	35,502,559,948	1,349,718,389,418	1,551,559,239,735

**DATA PMDN  
(RUPIAH)**

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2008	28,559,361,000	86,951,568,071	19,586,290,000	926,862,950,864	744,466,285,910
2009	28,559,361,000	96,951,568,071	29,074,371,000	983,462,950,863	744,466,295,910
2010	756,176,285,910	962,340,323,725	96,951,568,071	34,017,508,942	35,440,183,148
2011	34,017,508,942	189,255,749,065	35,502,559,948	1,218,958,350,918	835,409,526,910
2012	34,017,508,942	191,257,086,711	35,502,559,948	1,242,033,289,418	1,303,134,160,910
2013	34,017,508,942	241,023,193,711	35,502,559,948	1,242,243,389,418	1,311,867,839,735
2014	498,512,130,000	249,910,092,675	123,524,460,000	2,890,038,719,364	2,193,868,440,844

**DATA INVESTASI**

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2008	29,959,361,000	91,131,007,071	62,149,871,000	1,500,275,138,078	1,085,584,368,523
2009	32,449,361,000	101,131,007,071	73,441,871,000	1,615,675,138,077	1,088,684,378,523
2010	1,136,443,830,353	1,725,199,756,729	260,505,758,071	3,274,017,508,942	91,806,683,148
2011	37,257,508,942	399,285,181,265	139,213,204,348	3,659,303,933,818	2,645,235,338,810
2012	37,438,008,942	440,374,166,711	142,546,529,948	3,771,084,659,418	3,136,858,490,910
2013	37,095,958,942	467,278,566,386	131,842,139,948	3,962,346,748,782	3,469,206,720,579
2014	876,985,938,942	503,202,386,386	159,027,019,948	4,239,757,108,782	3,745,427,680,579

**DATA PENGELUARAN PEMBANGUNAN**

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2008	166,267,214	401,806,287	227,644,827	203,921,988	197,351,279
2009	133,978,852	236,763,072	174,904,520	264,945,551	253,575,638
2010	96,285,951	192,585,117	177,146,573	244,785,995	240,458,148
2011	148,617,149	188,956,076	228,020,384	376,426,982	262,298,842
2012	216,609,481	256,457,671	294,608,086	330,515,199	267,344,485
2013	235,392,931	349,783,315	339,027,067	465,437,074	443,483,120
2014	297,368,394	575,478,607	395,570,210	642,839,590	696,080,399

**DATA VARIABEL KETIMPANGAN PENDAPATAN  
DAERAH**

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2008	0.300	0.416	0.374	0.381	0.268
2009	0.307	0.416	0.373	0.390	0.249
2010	0.307	0.417	0.372	0.392	0.248
2011	0.307	0.416	0.372	0.393	0.247
2012	0.307	0.416	0.373	0.393	0.246
2013	0.305	0.401	0.372	0.343	0.230
2014	0.305	0.401	0.372	0.342	0.230

**DATA VARIABEL PERTUMBUHAN  
EKONOMI**

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2008	4.71	4.90	4.39	5.13	5.12
2009	3.97	4.47	4.14	4.48	4.46
2010	3.06	4.97	4.15	4.49	4.98
2011	4.23	5.07	4.52	5.42	3.84
2012	4.37	5.33	4.84	5.79	3.40
2013	4.87	5.46	4.97	5.89	3.47
2014	4.55	5.15	4.54	5.41	3.30

**DATA VARIABEL JUMLAH  
PENDUDUK BEKERJA**

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2008	0.57	0.55	0.55	0.57	0.47
2009	0.55	0.55	0.56	0.55	0.55
2010	0.52	0.52	0.53	0.52	0.52
2011	0.52	0.51	0.52	0.50	0.52
2012	0.55	0.52	0.60	0.48	0.51
2013	0.57	0.50	0.60	0.50	0.49
2014	0.58	0.44	0.33	0.51	0.53

**DATA VARIABEL  
PENGELUARAN  
PEMERINTAH**

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2008	443.64	441.64	331.47	196.04	431.92
2009	345.76	263.27	258.94	246.54	650.72
2010	247.68	211.50	262.67	224.46	619.60
2011	377.01	204.92	332.88	337.24	668.27
2012	543.33	274.38	425.38	292.77	672.41
2013	583.84	369.33	484.19	407.66	1101.33
2014	729.36	599.80	558.88	556.81	1707.47

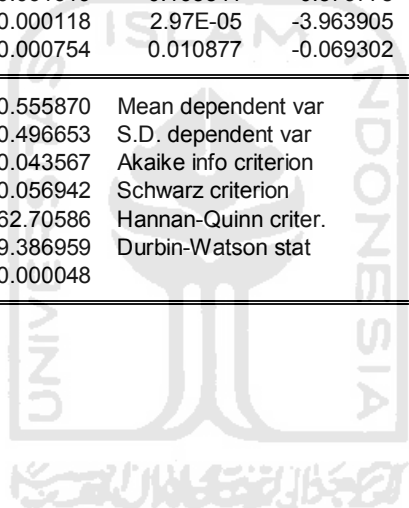
**DATA VARIABEL  
INVESTASI**

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2008	10.48	10.96	10.79	12.18	12.04
2009	10.51	11.00	10.87	12.21	12.04
2010	12.06	12.24	11.42	12.52	10.96
2011	10.57	11.60	11.14	12.56	12.42
2012	10.57	11.64	11.15	12.58	12.50
2013	10.57	11.67	11.12	12.60	12.54
2014	11.94	11.70	11.20	12.63	12.57



Dependent Variable: Y  
 Method: Least Squares  
 Date: 12/24/16 Time: 08:59  
 Sample: 1 35  
 Included observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.307092	0.177722	1.727936	0.0943
X1	0.028411	0.012287	2.312371	0.0278
X2	-0.061619	0.163541	-0.376778	0.7090
X3	-0.000118	2.97E-05	-3.963905	0.0004
X4	-0.000754	0.010877	-0.069302	0.9452
R-squared	0.555870	Mean dependent var		0.342286
Adjusted R-squared	0.496653	S.D. dependent var		0.061408
S.E. of regression	0.043567	Akaike info criterion		-3.297477
Sum squared resid	0.056942	Schwarz criterion		-3.075285
Log likelihood	62.70586	Hannan-Quinn criter.		-3.220777
F-statistic	9.386959	Durbin-Watson stat		1.748505
Prob(F-statistic)	0.000048			



Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.142107	Prob. F(1,29)	0.7089
Obs*R-squared	0.170672	Prob. Chi-Square(1)	0.6795

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

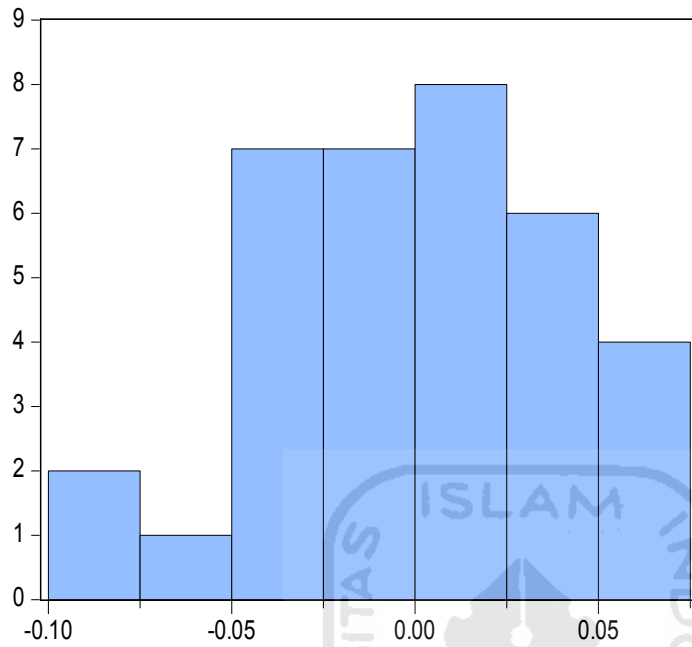
Date: 12/24/16 Time: 08:59

Sample: 1 35

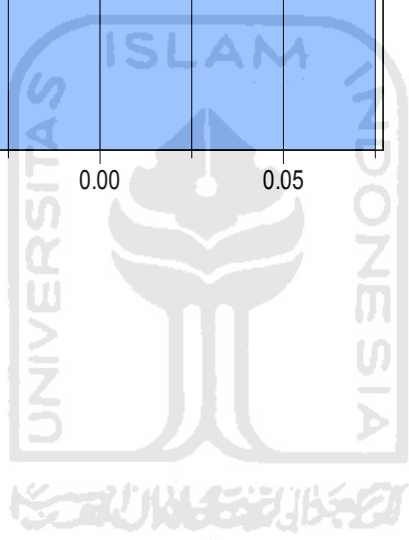
Included observations: 35

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.014648	0.184458	0.079409	0.9373
X1	-0.001161	0.012841	-0.090412	0.9286
X2	0.001454	0.165976	0.008761	0.9931
X3	1.81E-07	3.01E-05	0.006007	0.9952
X4	-0.000856	0.011267	-0.075965	0.9400
RESID(-1)	0.078312	0.207741	0.376971	0.7089
R-squared	0.004876	Mean dependent var		2.93E-17
Adjusted R-squared	-0.166697	S.D. dependent var		0.040924
S.E. of regression	0.044203	Akaike info criterion		-3.245223
Sum squared resid	0.056664	Schwarz criterion		-2.978592
Log likelihood	62.79140	Hannan-Quinn criter.		-3.153182
F-statistic	0.028421	Durbin-Watson stat		1.827800
Prob(F-statistic)	0.999568			



Series: Residuals	
Sample 1 35	
Observations 35	
Mean	2.93e-17
Median	0.012100
Maximum	0.071914
Minimum	-0.096044
Std. Dev.	0.040924
Skewness	-0.487749
Kurtosis	2.691290
Jarque-Bera	1.526728
Probability	0.466096



Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.986806	Prob. F(14,20)	0.4989
Obs*R-squared	14.29930	Prob. Chi-Square(14)	0.4277
Scaled explained SS	8.884015	Prob. Chi-Square(14)	0.8384

Test Equation:  
 Dependent Variable: RESID^2  
 Method: Least Squares  
 Date: 12/24/16 Time: 09:00  
 Sample: 1 35  
 Included observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.333964	0.297390	-1.122981	0.2747
X1^2	-0.000944	0.000943	-1.000573	0.3290
X1*X2	-0.030444	0.045521	-0.668791	0.5113
X1*X3	3.45E-06	5.08E-06	0.678911	0.5050
X1*X4	-0.001559	0.002159	-0.722131	0.4786
X1	0.042013	0.044752	0.938786	0.3590
X2^2	-0.134032	0.118573	-1.130375	0.2717
X2*X3	-1.19E-06	7.92E-05	-0.015069	0.9881
X2*X4	-0.007970	0.029923	-0.266340	0.7927
X2	0.354659	0.296804	1.194927	0.2461
X3^2	3.76E-09	5.83E-09	0.644546	0.5265
X3*X4	-1.31E-06	5.71E-06	-0.228980	0.8212
X3	6.00E-07	9.96E-05	0.006022	0.9953
X4^2	-0.000627	0.001820	-0.344684	0.7339
X4	0.026079	0.046933	0.555667	0.5846
R-squared	0.408551	Mean dependent var		0.001627
Adjusted R-squared	-0.005463	S.D. dependent var		0.002147
S.E. of regression	0.002153	Akaike info criterion		-9.146806
Sum squared resid	9.27E-05	Schwarz criterion		-8.480229
Log likelihood	175.0691	Hannan-Quinn criter.		-8.916704
F-statistic	0.986806	Durbin-Watson stat		1.585316
Prob(F-statistic)	0.498928			

Covariance Analysis: Ordinary  
 Date: 12/24/16 Time: 09:01  
 Sample: 1 35  
 Included observations: 35

Correlation Probability	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000 ----			
X2	-0.097525 0.5773	1.000000 ----		
X3	-0.417668 0.0125	-0.095439 0.5855	1.000000 ----	
X4	0.051113 0.7706	-0.286734 0.0949	0.232220 0.1795	1.000000 ----

